

BAB IV
KAJIAN DAN ANALISIS
BUKU API SEJARAH DAN DAMPAK DEISLAMISASI

A. Deislamisasi Sejarah Indonesia

1. Pra Kemerdekaan

a. Islam Masuk Ke Indonesia

Mengawali tulisannya dalam pembuka perdana buku *Api Sejarah*, Ahmad Mansur Suryanegara mengemukakan beberapa fakta yang membantah anggapan sebagian sejarawan yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Padahal, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, agama Islam datang di Indonesia jauh lebih lama dari perkiraan tersebut, yakni sekitar abad ke-7 Masehi atau pada abad pertama Hijriah.¹

Dijelaskan lebih lanjut, berabad-abad sebelum itu kata Ahmad Mansur Suryanegara, negara-negara di Timur Tengah seperti Saudi Arabia dan Yaman, telah menjalin hubungan perdagangan luas dengan negeri-negeri lainnya. Oleh karena itulah, maka kemungkinan besar Islam dibawa para wirausahawan Arab ke Nusantara berlangsung pada abad ke-1 H, atau abad ke-7 M.

Informasi sejarah tentang aktivitas pasar di Arabia ini menurut Ahmad Mansur Suryanegaa kurang dipahami oleh sebagian sejarawan. Hal ini akibat sistem penulisan sejarah yang masih meniru cara pandang

¹Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jilid I, (Penerbit Surya Dinasti: Jakarta, 2015), h. 2.

sejarawan Barat, yang yang umumnya mengesampingkan peranan pasar Arabia. Sebaliknya, mereka lebih mengangkat penulisan sejarah tentang peranan pasar di Cina dan India.

Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab terus-menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Bangsa Arab merupakan wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh yaitu Cina dan Jepang. Mereka tidak hanya memperdagangkan hasil tanah Arab saja. Akan tetapi, perdagangan mereka meliputi pula barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan sebagainya. Berupa gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah, emas, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena bangsa Arab dahulunya adalah pengembara, benar-benar seperti keadaan mereka pada masa kini.²

Lebih lanjut, dalam penulisan sejarah Indonesia yang didistorsikan oleh para penulisnya, hubungan perdagangan antara Cina dan Arab, dan antara India dan Arab, tidak digambarkan dalam penulisan sejarah. Padahal, menurut Ahmad Mansur, sejak 500 Sebelum Masehi (SM), sudah terjalin jalur hubungan niaga melalui jalan darat yang dikenal dengan istilah jalur sutera. Sedangkan jalur perniagaan laut antara India, Cina dan Nusantara Indonesia telah terjalin sejak abad pertama Sebelum Masehi (SM).

Demikian pula dalam perkembangan niaga Islam ke Eropa, Inggris, dan Rusia sangat langka untuk memperoleh informasi sejarahnya secara benar. Padahal di wilayah ini ditemukan mata uang Islam tersebar di Rusia, Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Terdapat juga peninggalan mata uang Islam di Inggris, Irlandia, dan Baltik, Skandinavia. Fakta ditemukannya mata uang Islam tersebut sebagai bukti betapa luasnya pengaruh ekonomi perdagangan dan budaya Islam yang terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-11 M di dunia Barat. Tidak berbeda tentang sejarah mata uang yang pernah dikeluarkan oleh Kesoeltanan Mataram Yogyakarta, Kesoeltanan

²*Ibid.*, h. 2.

Banten, dan lainnya, tidak pernah ditulis dalam buku sejarah.³

Peran aktif wirausahawan Nusantara menurut Ahmad Mansur Suryanegara, tidak tergambarkan sama sekali dalam pasar internasional. Padahal, rempah-rempah yang diperdagangkan di pasar Eropa pada masa itu berasal dari Nusantara. Akibatnya, tempat dan rute menuju ke pusat rempah-rempah sengaja dirahasiakan. Sehingga, dalam penulisan sejarah, nama-nama kepulauan yang terdapat di Nusantara menjadi tidak disebutkan. Maka tidak mengherankan, dunia Barat pada waktu itu banyak yang tidak memahami betapa luasnya Nusantara. Mereka hanya mengenal nama wilayah Cina dan India saja. Dampaknya, menurut Ahmad Mansur, dalam pandangan Barat terdapat banyak wilayah di dunia yang disebut dengan nama, India.⁴

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Arabia dulunya merupakan pasar penghubung antara India, Cina, dan Nusantara dengan negara Timur Tengah, serta menjadi penghubung pasar-pasar di Eropa. Jika rempah-rempah merupakan barang yang paling dicari oleh pasar-pasar internasional pada saat itu, maka dapat dipastikan pasar-pasar di Nusantara memiliki peranan besar dalam memenuhi permintaan pasar internasional tersebut. Dengan demikian, agama Islam bisa masuk dan berkembang ke Asia Tenggara juga melalui peran pasar-pasar ini pula.

³*Ibid.*, h. 2.

⁴*Ibid.*, h. 8.

Berdasarkan gambaran di atas, terdapat problem dalam penulisan sejarah Indonesia, yakni terbaca adanya upaya deislamisasi yang dilakukan oleh sejarawan Barat dalam melakukan penulisan sejarah Indonesia, khususnya tentang sejarah Islam. Yakni, dari segi waktu masuknya agama Islam, yang seharusnya menurut Buya Hamka adalah pada abad pertama Hijriah atau Abad ke-7 M. dimundurkan waktunya menjadi abad ke-13 M, yaitu ketika perkembangan Islam telah meluas ke pelosok-pelosok, dan setelah berdirinya kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Samudra Pasai.

Sejarawan Barat pada masa pemerintah kolonial Belanda sengaja membuat periodisasi sejarah Indonesia dan memundurkan waktu masuknya agama Islam berada jauh mundur ke belakang atau sesudah keruntuhan kekuasaan politik Hindu atau Kerajaan Hindu Majapahit. Dengan berdasarkan periodisasi sejarah tersebut, menjadikan Islam baru dibicarakan setelah runtuhnya Kerajaan Hindu Majapahit pada tahun 1478 M. Selain itu, tidak dijelaskan pula bahwa sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M, ajaran agama Islam sudah mulai didakwahkan oleh para pedagang muslim di Asia Tenggara.

Lebih lanjut, Ahmad Mansur Suryanegara mengungkapkan tentang upaya deislamisasi sejarah Islam Indonesia. Yakni, sejarawan menuliskan bahwa Sejarah Islam Indonesia adalah sebagai Sejarah Lokal. Anggapan mereka ini tanpa dasar yang kuat dan terkesan mengabaikan tentang fakta sejarah bangsa Indonesia, yang sejak lama telah menjalin hubungan

dengan negara-negara luar, termasuk negara-negara Barat.

Ada pula sejarawan yang menuliskan Sejarah Islam Indonesia sebagai Sejarah Lokal. Tidak dinilai sebagai Sejarah Internasional Walaupun perdagangan pada masa Islam telah mengadakan kontak dagang dengan pasar dunia. Atau dengan mengadakan kontak niaga dengan Cina, India, dan Timur Tengah serta Barat. Dalam hal lawan politik Islam pun, musuh Islam adalah penjajah Barat. Dalam menghadapi perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat, Islam Indonesia berhadapan dengan kerajaan-kerajaan imperialis Barat, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Dengan adanya perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat tersebut, menjadikan perkembangan Sejarah Islam Indonesia, tidak dapat dinilai sebagai Sejarah Lokal, melainkan sebagai Sejarah Internasional.⁵

Apalagi setelah Sultan Ali Alauddin Mansur Syah (1254-1289 H/1838-1870 M) mengadakan kontak niaga dengan Kerajaan Katolik Perancis, di bawah Napoleon III pada 1852 M. Hal ini diikuti dengan meningkatkan hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki pada 1288 H/1869 M, yang dilanjutkan dengan upaya peningkatan hubungan diplomatik pada masa Sultan Mahmud Syah (1289/1293 H/1870-1874 M) antara Kesultanan Aceh dengan Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Republik Perancis di bawah Presiden Thiers.

Fakta sejarah tersebut menggambarkan betapa luasnya wawasan diplomatik Kasultanan Aceh pada abad ke-19 M. Dalam menghadapi ancaman Kerajaan Protestan Belanda, Kesultanan Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Katolik Napoleon III (1852 M), Republik Perancis, kemudian menjalin hubungan dengan Amerika Serikat dan Inggris, sebagai imperialis Barat yang masih mencari tanah jajahan

⁵*Ibid.*, h. 15.

yang bersaing dengan Kerajaan Protestan Belanda.

Dalam penulisan sejarah, umumnya disebutkan bahwa Kesultanan Atjeh hanya berhubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki. Akibatnya, generasi sekarang hanya memiliki pengertian hubungan diplomatik internasional terjadi pada abad ke-20 M. Para Soeltan dibayangkan hanya sebagai penguasa yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat lainnya.⁶

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuasaan politik Islam di Timur Tengah dan sekitarnya, misalnya Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah serta Kesultanan Turki Utsmani, diikuti kerajaan Mongol atau Moghul di India. Hal ini membuktikan bahwa Sejarah Islam Indonesia adalah juga Sejarah Islam Internasional.

Tumbuhnya kekuasaan politik Islam di Timur Tengah. Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah dan Fathimiyah serta Kesultanan Turki, diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu dan Buddha di India dan timbulnya kekuasaan politik Islam di India oleh Mongol atau Moghul. Kemudian, timbulnya kerja sama antara Abbasiyah, Khalifah Hisyam dengan Kaisar Hsuan Tsung. Timbulnya kekuasaan politik Islam yang dibangun oleh Kaisar Dinasti Genghis Khan besar pengaruhnya terhadap perubahan kebijakan politik Kaisar Kubilai Khan dan Kaisar Ming di Cina yang berpihak kepada Islam. Selain itu, pengaruhnya menjadikan Yunan sebagai salah satu provinsi Cina dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan masjid di Peking atau di daerah luarnya yang semakin banyak. Pengaruhnya di Nusantara Indonesia mendorong meluasnya kekuasaan politik Islam dan pertumbuhan masjid, pesantren serta pasar di dalam dan luar Pulau Jawa.⁷

⁶*Ibid.*, h. 261-262.

⁷*Ibid.*, h. 118.

Adapun mengenai waktu kapan masuknya agama Islam ke Indonesia dan berasal darimana, menurut Ahmad Mansur Suryanegara terdapat beberapa teori mengenai hal tersebut, yakni:

1) Teori Gujarat C. Snouck Hurgronje

Teori pertama yang membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah Teori Gujarat yang dipopulerkan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para saudagar dan Ulama dari Gujarat, India.

Hanya akibat sistem penulisan, sejarah Islam Indonesia mengikut hasil penulisan sarjana Belanda, terutama mengikut teori C. Snouck Hurgronje, maka diteorikan Islam masuk dari Gujarat. Menurutnya, Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India. Dijelaskan pula bahwa daerah India tersebut adalah Gujarat. Daerah pertama yang dimasuki adalah Kesultanan Samudra Pasai. Waktunya abad ke-13 M.⁸

Pendapat Snouck Hurgronje ini oleh sebagian kalangan dianggap lemah, dikarenakan pada saat itu, sudah berdiri kekuasaan politik Islam (kesultanan), yakni Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 M. Maka secara logika, Islam masuk di Indonesia jauh sebelumnya. Snouck Hurgronje tidak menjelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam. Apakah mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung mendirikan kekuasaan politik atau kesultanan tanpa melalui proses Islamisasi terlebih dahulu.

⁸*Ibid.*, h. 101.

Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan Mazhab Syafi'i di Indonesia, dapat kita baca dari berita wisata Ibnu Batuttah yang berkunjung ke Kesultanan Samodra Pasai. Ibnu Batuttah sebagai wisatawan Muslim Maroko, pernah berkunjung ke Samodra Pasai pada 745-746 H/1345 M, menjelaskan bahwa di Gujarat berkembang agama Islam dari Mazhab Syi'ah. Sedangkan di Samodra Pasai menganut Mazhab Syafi'i.⁹

Masalah perbedaan mazhab antara Samudra Pasai dengan Gujarat ini dijadikan koreksi oleh Buya Hamka terhadap teori Gujarat. Menurut Buya Hamka, jika benar agama Islam berasal dari Gujarat dan wilayah yang pertama menerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai seperti yang dituliskan oleh Snouck Hurgronje, maka seharusnya Samudra Pasai menganut mazhab Syi'ah. Namun, kenyataannya tidak demikian. Menurut Ibnu Batuttah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Mansur Suryanegara, bahwa mazhab yang dianut oleh Kesultanan Samudra Pasai berdasarkan keterangan Sultan Malikul Zahir, menganut Mazhab Syafi'i dan berfaham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, perbedaan Mazhab antara Samudra Pasai (Syafi'i) dan Gujarat India (Syi'ah), yang hidup pada abad ke-13 M, oleh Buya Hamka dijadikan alasan dasar penolakan terhadap teori C. Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia berasal dari Gujarat India dan waktunya pada abad ka-13 M.¹⁰

Berdasarkan inilah, Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Buya Hamka menyatakan agama Islam bukan berasal dan Gujarat yang

⁹*Ibid.*, h. 118-120.

¹⁰*Ibid.*, h. 120.

bermazhab Syi'ah, melainkan oleh para pedagang Arab dibawa langsung dari Timur Tengah (Makkah). Dijelaskan lebih lanjut dalam perkembangannya, agama Islam di Indonesia merupakan penganut Ahlul Sunnah wal Jama'ah, sementara dalam bidang fikih mayoritas adalah bermazhab Syafi'i.

2) Teori Makkah Buya Hamka

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, dalam Seminar *Masuknya Agama Islam ke Indonesia* yang dilaksanakan di Medan (1963), Buya Hamka berkesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, dengan menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina pada masa *Dinasti Tang*. Pada masa *Dinasti Tang* menuturkan bahwa mereka menemukan daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatra. Berdasarkan bukti inilah, maka disimpulkan Islam masuk ke Indonesia dari daerah asalnya (Makkah), yang dibawa oleh wiraniagawan Arab.

Adapun waktu masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia terjadi pada abad ke-7 M. Dalam Berita *Cina Dinasti Tang* tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatra maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab. Dibawa oleh wiraniagawan Arab. Sedangkan Kesultanan Samodra Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke-13 M, bukan awal masuknya agama Islam, melainkan perkembangan agama Islam.¹¹

¹¹*Ibid.*, h.101.

3) Teori Persia Hoesein Djajadiningrat

Abubakar Atjeh mengikuti pandangan Hoesein Djajadiningrat, meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia dan bermazhab Syi'ah. Pendapatnya ini didasarkan pada sistem baca atau sistem mengeja huruf Al-Qur'an di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Yakni, menurut Hoesein Djajadiningrat sama dengan mengeja membaca huruf Al-Qur'an di Persia.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, teori persia ini dinilai lemah dikarenakan di Persia sendiri, penggunaan sistem baca huruf Al-Qur'an seperti demikian tidak semuanya merupakan penganut Mazhab Syi'ah. banyak juga yang berfaham Ahlu Sunnah Wal Jama'ah.

Tidakkah pada saat Baghdad sebagai ibu kota *Khilafah Abbasiyah*, *Khalifah Abbasiyah* umumnya penganut *Ahlush Shunnah wal jama'ah*. Lebih jelas, di Jawa Barat walaupun sistem mengeja baca huruf Al-Qur'an dengan cara seperti itu. Namun, para pengguna sistem baca Persia bukan penganut Mazhab Syi'ah. Tidakkah penganut tasawuf *Qadiriyah Naqsabandiyah* bukan penganut Mazhab Syi'ah? Pada umumnya, di Jawa Barat bermazhab Syafi'i, seperti Abbasiyah di Baghdad Persia bermazhab Syafi'i.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berkesimpulan bahwa teori Persia ini lemah, karena faktanya mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i dan berfaham *Ahlush Shunnah wal jama'ah (Aswaja)*, dan bukan Syi'ah seperti yang dikemukakan oleh Abubakar Atjeh dan Hoesein Djajadiningrat. Memang ada sebagian daerah di Indonesia yang Syi'ah, namun, tidak sebanyak *Ahlush Shunnah wal jama'ah*.

¹²*Ibid.*, h.102.

4) Teori Cina Slamet Muljana

Slamet Muljana (1969), dalam buku *Runtuhnya Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*, tidak hanya berpendapat Sultan Demak adalah orang keturunan Cina. Namun juga, menyimpulkan bahwa para Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapatnya ini bertolak dari Kronik *Klenteng Sam Po Kong*. Misalnya kata dia, Sultan Demak Panembahan fatah dalam Kronik *Klenteng Sam Po Kong* bernama Panembahan Jin Bun nama Cina-nya. Arya Damar sebagai pengasuh Panembahan Jin Bun pada waktu di Palembang, bernama Cina, Swan Liong. Sultan Trenggana disebutkan dengan nama Cina, Tung Ka Lo. Sedangkan nama-nama Wali Songo yang dicinakan, antara lain: Sunan Ampel dengan nama Cina, Bong Swi Hoo. Sunan Gunung Djati dengan nama Cinanya, Toh A Bo.

Sebenarnya menurut budaya Cina dalam penulisan sejarah nama tempat yang bukan negeri Cina, dan nama orang yang bukan bangsa Cina, juga dicinakan penulisannya. Misalnya putri dari Radja Wikramawardhana adalah Suhita, dan sebagai Ratoe Kerajaan Hindu Madjapahit, dituliskan nama Cinanya, Su King Ta. Nama Kerajaan Buddha Sriwijaya dituliskan dengan nama Cina, *San-fo-tsi* Namun anehnya, Slamet Muljana tidak menyebutkan bahwa Ratu Suhita atau Su King Ta adalah orang peranakan Cina dan Kerajaan Buddha Sriwidjaja atau *San-fo-tsi* adalah Kerajaan Cina.¹³

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, mengapa tidak seluruh nama pelaku sejarah dan nama tempat yang dicinakan dalam penulisan *Kronik Klenteng Sami Po Kong* ditafsirkan menjadi Cina semuanya. Dengan pengertian tidak ada seorang pun Pribumi. Tidak ada sebuah

¹³*Ibid.*, h. 102.

kerajaan pun di Nusantara Indonesia yang bukan bagian dari Kerajaan Cina. Jadi, tidak hanya sebatas nama-nama wali dan Dinasti Soeltan Demak semata yang ditafsirkan sebaga Cina karena seluruh penulisannya dicinakan dalam *Kronik Klenteng Sam Fo Kong*, kemudian seharusnya ditafsirkan pula sebagai peranakan Cina atau wilayah Cina.

Berdasarkan inilah, kelemahan data dan sistem interpretasi yang demikian ini kata Ahmad Mansur Suryanegara, menjadikan G.W.J. Drewes, menyatakan bahwa data-data yang dikumpulkan oleh Slamet Muljana tersebut kurang akurat dan tidak beralasan.¹⁴ Akibatnya dengan sendirinya teori Cina ini gugur dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan ilmiah.

5) Teori Maritim N.A. Baloch

Menurut N.A. Baloch, dalam buku *The Advent of Islam in Indonesia*, agama Islam masuk ke Indonesia pada masa abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yang dikenalkan oleh para pedagang asal Timur Tengah. Adapun masa waktu yang ditempuh dalam proses penybaran agama Islam ini berlangsung kurang lebih lima abad, yakni, sejak abad pertama hingga abad kelima Hijriah.¹⁵

Hal ini disebabkan para pedagang muslim memiliki navigator dan dinamik dalam penguasaan pasar, khususnya di wilayah Nusantara. Melalui aktivitas pasar inilah, ajaran Islam mulai diperkenalkan oleh para pedagang muslim di sepanjang jalur laut niaga tempat persinggahannya

¹⁴*Ibid.*, h. 103.

¹⁵N.A. Baloch, *The Advent of Islam In Indonesia*. (National Institute of Historical and Cultural Research: Islamabad, 1980), h. 1-2.

hingga mencapai wilayah Cina Utara.

Menurut N.A. Baloch sejarawan Pakistan, Masuk dan Perkembangan agama Islam di Nusantara Indonesia, akibat umat Islam memiliki navigator atau mualim dan wirausaha Muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar. Melalui aktivitas ini, ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya pada masa abad ke-1 H atau abad ke-7 M. Oleh karena itu, langkah awal sejarahnya, ajaran Islam dikenalkan di pantai-pantai Nusantara Indonesia hingga di Cina Utara oleh para wirausahawan Arab. Dijelaskan pula tentang waktunya, terjadi pada abad ke-1 H atau 7 M. Adapun proses waktu yang dilalui dalam dakwah pengenalan ajaran Islam ini, berlangsung selama lima abad, dari abad ke 1-5 H/7-12M.¹⁶

N.A. Baloch menjelaskan seperti yang dikutip oleh Ahmad Mansur

Suryanegara, sejak abad ke-6 H atau abad ke-13 M, penyebaran agama Islam terjadi hingga ke pelosok-pelosok Nusantara. Pada periode ini penyebaran agama Islam ke pelosok-pelosok dan pedalaman dilakukan oleh para pedagang pribumi. Dan pada masa periode ini pula, kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Indonesia mulai tumbuh, yakni dimulai dengan berdirinya Kesultanan Aceh pada abad ke-9 M, kemudian disusul oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Samudra Pasai pada abad ke-13 M.¹⁷

b. Perkembangan Islam di Indonesia

Masuknya agama Islam di Asia Tenggara awalnya melalui gerbang pasar yang disebarkan oleh para pedagang muslim yang merangkap sebagai juru dakwah. Mereka berangkat dengan modal sendiri dengan kemampuan yang mumpuni dalam penguasaan maritim, serta penguasaan

¹⁶Ahmad Mansur Suryanegara, h. 104.

¹⁷*Ibid.*, h. 104.

pasar, secara cepat menjadikan agama Islam tersebar di seluruh wilayah kepulauan Asia Tenggara. Penyebaran agama Islam di Indonesia sendiri melibatkan setiap muslim dengan beragam profesi dan status sosial, yang merasa terpanggil untuk menyebarkan ajaran Islam dengan metode yang sesuai dengan profesinya masing-masing. Dengan kata lain, pedagang menyebarkan ajaran Islam dengan bahasa niaganya, bangsawan menyebarkan ajaran Islam dengan bahasa struktural keningatnya, dan seterusnya.

Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, “sampaikanlah ajaran yang berasal dariku, walaupun baru satu ayat”. Dengan kata lain, setiap muslim mempunyai kewajiban dan tanggungjawab ikut serta (berperan aktif) dalam menyebarkan ajaran Islam. Dengan cara demikian, menyebabkan agama Islam secara cepat menyebar ke pelosok-pelosok nusantara dan selanjutnya menjadikan mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut, kesaksian sejarah dan catatan-catatan para wirausahawan muslim juga dapat dijadikan sebagai sumber dalam penulisan sejarah Indonesia.¹⁸

Dalam penulisan sejarah Indonesia yang ditulis oleh Sejarawan Barat, dikatakan bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara-cara kekerasan, yakni penyebaran agama Islam melalui penaklukan-penaklukan dan penguasaan wilayah oleh kesultanan Islam terhadap Kerajaan Hindu-Buddha.

¹⁸*Ibid.*, h. 30.

Didongengkan Keruntuhan Kerajaan Hindu Majapahit akibat serangan Kesoeltanan Demak pada 1400 Saka atau 1478 M. Akibat serangan ini maka Sang Praboe mengutuk Soenan Fatah dan Kesoeltanan Demak sebagai putra yang tidak tahu hormat kepada orang tuanya. Kemudian, Sang Praboe terbang ke langit. Ketika Laskar Demak membanjiri halaman Kraton Majapahit, dalam dongeng tersebut dikatakan sinar matahari terkalahkan oleh kilauan cahaya ribuan pedang laskar Demak.¹⁹

Selain dongeng tentang Keruntuhan Kerajaan Majapahit di atas, juga terdapat dongeng tentang Keruntuhan Kerajaan Hindu Pajajaran yang dilakukan oleh Sultan Maulana Yusuf dari Kesultanan Banten.

Terdapat pula dongeng-dongeng nasib Kerajaan Hindu Padjajaran yang dihancurkan oleh Soeltan Maoelana Yoesoef dari Kesoeltanan Banten, seperti halnya dongeng yang dikutip oleh D.G.E Hall dalam *A History of South East Asia*, menyatakan bahwa Panembahan Yusup Sultan Kedua Banten, menaklukkan Pakuan, melakukan pembantaian dan pemaksaan terhadap seluruh keluarga istana).²⁰

Penuturan dongeng demikian tidak lain adalah bertujuan untuk membentuk citra negatif kepada generasi muda bangsa Indonesia terhadap agama Islam. Hal ini merupakan salah satu metode pemerintah kolonial Belanda melalui penulisan sejarah dalam menciptakan *divide and rule* terhadap umat Islam dan Hindu. Seperti halnya penulisan sejarah tentang runtuhnya Kerajaan Hindu di India bagian selatan, yang dituliskan dalam sejarah hancur akibat serangan umat Islam. Padahal, sebenarnya runtuhnya Kerajaan Hindu tersebut akibat ditutupnya jalan niaga laut oleh imperialis Barat: Kerajaan Katolik Perancis di Pondichery, Kerajaan Calvinis Belanda di Negapatan dan Sri Langka, Kerajaan Katolik Portugis di Goa, dan Kerajaan Protestan Inggris di Bombay, Kalkuta, dan Madras. Namun,

¹⁹*Ibid.*, h. 123.

²⁰*Ibid.*, h. 126.

dituduhkan keruntuhan Kerajaan Hindu dan Buddha tersebut akibat serangan Islam dan Afghanistan dan Mongol.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegaa, dongeng tentang Keruntuhan Kerajaan Hindu Majapahit dan Kerajaan Hindu Pajajaran ini digunakan oleh para sejarawan Barat dalam menguatkan teori sejarah versi mereka, bahwa penyebaran agama Islam di Indonesia dikembangkan dengan pedang. Yakni, menurut mereka Islam dikembangkan melalui pemaksaan dan penindasan. Padahal, realitas sejarah yang sebenarnya tidak demikian. Islam di Indonesia tidak mengenal adanya pemaksaan agama Islam kepada masyarakat pribumi. Para wirausahawan muslim tersebut tidak datang sebagai penakluk seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16. Tujuan mereka datang ke Indonesia adalah untuk berdagang. Dan dari hasil penjualannya tersebut lebih merekautamakan sebagai modal dalam berdakwah daripada untuk memperkaya diri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masuk dan berkembangnya agama Islam Indonesia diawali oleh pedagang Arab, yang diikuti oleh India dan Cina. Adapun jalan yang ditempuh oleh para pendakwah atau para pedagang muslim tersebut, yakni melalui jalan damai dan masuk melalui jalur pasar.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, masyarakat Indonesia umumnya mengira, bahwa Wali Songo merupakan pembawa pertama ajaran Islam ke Nusantara. Padahal, kata dia, aktivitas para Wali Songo tersebut terjadi pada periode Perkembangan Agama Islam di Indonesia

yang ditandai dengan berdirinya kekuasaan politik Islam.

Umumnya, kita mengira Wali Songo sebagai pembawa pertama ajaran Islam ke Nusantara Indonesia. Padahal aktivitas para Wali Songo terjadi pada periode Perkembangan Agama Islam di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya kekuasaan politik Islam atau kesultanan.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa generasi muda Islam akan mempunyai kesadaran sejarah yang benar jika mereka membaca kembali peninggalan sejarah yang dituliskan secara benar, dan bukan sejarah yang sudah mengalami pendistorsian. Oleh karenanya, diperlukan adanya penulisan ulang sejarah pada setiap generasi. Dengan interpretasi yang relevan atau sesuai dengan zamannya. Tanpa diadakannya penulisan ulang dengan penafsiran yang baru, sejarah sebagai ilmu tidak punya manfaat bagi orang yang sedang dilaluinya.

c. Imperialis Barat Masuk Ke Indonesia

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, kedatangan imperialis Barat, yakni Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol diawali pada abad ke-16 M, kemudian disusul oleh imperialis Kerajaan Protestan Belanda dan Inggris pada abad ke-17.

Tantangan penjajahan Barat tersebut, dijawab oleh Ulama dan Santri dengan masyarakat pesantrennya, dan bersama para sultan dengan pengaruh kekuasaan politiknya melancarkan perlawanan bersenjata terhadap imperialis Barat, baik di darat maupun di laut.

²¹*Ibid.*, h. 119.

Adapun kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad ke-16 M, yang melancarkan perlawanan bersenjata, antara lain adalah: Kesoeltanan Demak, Kesoeltanan Tjrebon, Kesoeltanan Banten dan Jayakarta, Kesoeltanan Atjeh, Kesoaltanan Ternate, Kesoeltanan Tidore, Kesoeltanan Ambon, Kasoeltanan Bacan, Kesoeltanan Djailolo, Kesoeltanan Goa, Kesoaltonan Broenei terhadap imperialis Barat; Kerajaan Katolik Portoegis dan Spanyol pada abad ke-16 M. Kemudian dilanjutkan oleh Kesoeltanan Mataram dan Tatar Oekoet, Kesoeltanan Banten, Kesoeltanan Goa Makasar dan Kesoeltanan Atjeh terhadap imperialis Kerajaan Protestan Belanda dan Kerajaan Protestan Angilkan Inggris pada abad ke 17 M.²²

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, akibat kerajaan Hindu-Budha sudah tiada. Maka wajar saja para Ulama dan Santri bersama para Sultan pada waktu itu yang memimpin perlawanan bersenjata melawan penjajah.

Mengapa hanya dijawab oleh Ulama dan Santri? Hal ini terjadi akibat kedua Kerajaan Buddha Sriwijaya dan Kerajaan Hindu Madjapahit sudah tiada. Para sultan pada awalnya memimpin perlawanan bersenjata. Namun, sesudah dijerat dengan Perdjudjian Pendek (*Korte Verklaring*), para sultan tidak mungkin lagi mampu melancarkan perlawanan.²³

1) Perang Batak

Selain itu, sebagai respon terhadap para penjajah Barat terjadilah perang Batak, yang berlangsung sejak tahun 1872-1907 M, bersamaan dengan Perang Aceh, pada tahun 1873-1914 M. Kedua perang ini tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan provokasi imperialis Kerajaan Protestan Belanda. Provokasi ini sangat dipengaruhi oleh perolehan keuntungan Tanam Paksa yang sangat besar. Melalui kedekatan kedua wilayah tersebut, tidak mungkin salah satu diantara keduanya, dalam

²²*Ibid.*, h. 141-142.

²³*Ibid.*, h. 141-142.

tinjauan teori pelumpuhan sumber kekuatan lawan tanpa diserangnya.

Ambisi penyerangan imperialis Kerajaan Protestan Belanda didorong pula oleh situasi semakin menguatnya kedudukan kerajaan-kerajaan imperialis Protestan di Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat. Kondisi lain yang mendorong dipercepatnya penguasaan Pulau Sumatra, akibat dari semakin lemahnya kekuasaan Kesultanan Turki di Mesir dan Afrika Utara. Kontak niaganya dengan Nusantara Indonesia dan India diputuskan oleh imperialis Belanda dan Inggris. Selain itu, ancaman imperialis Amerika Serikat mulai merambah wilayah Pasifik dan Asia Tenggara.

Perang dimulai dengan serbuan Zending, terutama yang dipimpin oleh Rijnsche Zending, berhasil memasuki wilayah subur Danau Toba. Wilayah ini sebagai salah satu sumber potensi dari Si Singamangaradja XII. Invasi menjadi Si Singamangaradja XII mengadakan kontak dengan Aceh dan Sumatra Barat. Dalam melancarkan perlawanan bersenjata, Si Singamangaradja XII didampingi oleh dua panglima yaitu Panglima Nali dari Sumatra Barat dan Panglima Teoekoe Mohammad dari Aceh. Mungkinkah Si Singamangaradja XII mau menerima tawaran Untuk menyerah dalam perundingan, bila ayahnya, S Singamangaradja XI, dibunuh oleh Belanda.

Perang ini terjadi selama 35 tahun, pada 1289-1325 H 1872-1907 M. Selama itu, Si Singamangaradja XII mempertahankan negerinya dari penjajahan Kerajaan Protestan Belanda. Tiga puluh lima tahun bukanlah

waktu yang pendek. Invasi tentara Belanda, sebenarnya tidak cukup untuk menguasai wilayah Sumatra Utara seluas 3.69 persen dari luas wilayah Nusantara atau 71.680 km. Tambahan lagi, bersamaan waktunya dengan Perang Atjeh yang terjadi di wilayah 55.390 km atau 2.8 % luas Indonesia.

Hanya dengan melancarkan ruthless operation tanpa belas kasih yang dipimpin oleh perwiranya yang callousness (tanpa berperasaan), serta bantuan misionaris Nommensen dan Simoniet, memungkinkan perlawanan Si Singamangaradja XII dapat diperlemah. Apalagi, setelah Tjoet Nja Dhien tertangkap, pada 1322 H/1904 M dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, menyusul Si Singamangaradja XI dan putrinya, gugur sebagai syuhada, pada 1325 H/1907 M.²⁴

Perang Batak yang dipimpin oleh Si Singamangaradja XII pada, 1289-1325 H/1872-1907 M. Dalam Sejarah Indonesia ditulis Si Singamangradja XII sebagai penganut agama Perpegu. Dalam realitas sejarahnya, Si Singamangaradja XII seorang Muslim yang sangat taat kepada ajaran Rasulullah SAW. Dapat dibaca pada stempelnya. Tidak hanya menyebutkan dirinya sebagai Raja di Bakara. Namun juga, menuliskan Tahun Hijriah Nabi pada 1304. Pada umumnya, dalam penulisan Tahun Hijrah, cukup dengan angka tahun diikuti tahun hijriahnya dengan disingkat dengan huruf H.

Tidaklah demikian halnya dengan Si Sigamangaradja XII Dituliskan dengan lengkap penyebutan Hijriah Nabi. Benderanya Merah Putih. Di dalamnya terdapat gambar Pedang Rasulullah SAW yang bercabang dua. Di kanan kainnya terdapat pula lambang Bulan dan Matahari. Bulannya merupakan bulan sabit seperti pada umumnya lambang Islam. Namun, disertakan pula garis lengkung didepannya sehingga membentuk bulan purnama. Mataharinya pun bukan seperti lambang Muhammadiyah dan Persatuan Islam, melainkan matahari dengan sinar delapan yang

²⁴*Ibid.*, h. 244.

berati melambangkan cahaya kejayaan kearah delapan penjuru angin. Dapat juga diartikan sebagai lambang empat sahabat Rasulullah SAW atau Khulafaur Rasyidin dan empat Mazhab Fikih.²⁵

Dampak dari upaya deislamisasi dalam penulisan Sejarah Si Singamangaradja XII, membuat masyarakat setelahnya mejadi ragu bahwa Si Singamangaradja XII memeluk agama Islam. Dan sekarang pun lambang Pedang Si Singmangaraya XII dibalikkan posisinya dan dijadikan lambang lembaga pendidikan Kristen di Medan. Karena pada batas antara bagian pegangan dengan pedang yang terbelah dua terdapat penghalang genggam tangan yang melintang sehingga bentuknya mirip dengan Salib. Namun, kalau kita ikuti karya Sukatulis yang terbit 1907, menyatakan:

*Volgens berichten van de bevolking moet de tegen, woordige titularis een 5 tak jaren geleden tot den Islam zim bekeerd, doch hij werd geen fanatiek Islamiet en oefende gaan druk op zijn ongeving uit Om zich te bekeeren - Menurut kabar dari penduduk, raja yang sekarang (maksud Titularis adalah Si Singamangaradja XII), sejak lima tahun yang lalu telah memeluk agama Islam yang fanatik. Namun dia (Raja Si Singamangaradja XII) tidak memaksa supaya orang-orang di sekitarnya menukar agamanya menjadi Islam.*²⁶

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, dalam buku Perang Sasak yang ditulis oleh seorang penulis Kristen, memuat Stempel Si Singamangarasja XII namun tidak menjelaskan mengapa Si Singamangaradja XII menggunakan Huruf Arab Melayu dan Tahun 1304 Hijrah Nabi.²⁷

²⁵*Ibid.*, h. 242.

²⁶*Ibid.*, h. 242.

²⁷*Ibid.*, h. 242.

2) Wali Songo

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, imperialis Barat dalam upaya penaklukan terhadap negara-negara Islam, mereka tidak hanya menjajah wilayah jajahan, melainkan juga mencoba menjajah pola pikir rakyat jajahannya dengan cara mendistorsikan penulisan sejarah. Dalam upaya menghilangkan kesadaran umat Islam tentang pasar dan wiraswasta misalnya, Belanda berusaha untuk menguasai sistem penulisan sejarah Indonesia. Hal ini dikarenakan mereka sadar bahwa dari hasil penulisan sejarah tersebut akan berimplikasi terhadap pembentukan opini dan pola pikir masyarakat tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu melalui buku-buku sejarah yang mereka baca. Kemudian, dari hasil bacaan tersebut diharapkan akan membawa perubahan sistem keyakinan dan tingkah laku sosial, politik dan budaya bangsa, yang selanjutnya akan memihak kepada kepentingan kaum penjajah.²⁸ Dengan kata lain, mematahkan potensi pasar yang dikuasai umat Islam. Imperialis Barat dalam mempertahankan penjajahannya juga berusaha menciptakan hilangnya kemauan umat Islam untuk berwirausaha, yakni dengan cara menumbuhkan keinginan umat Islam hanya menjadi pegawai atau bawahan kaum penjajah.

Ahmad Mansur Suryanegara mengatakan, salah satu contoh bentuk deislamisasi sejarah yang dilakukan oleh Sejarawan Barat, misalnya Wali Songo sebagai tokoh penyebar ajaran Islam, didistorsikan atau diselewengkan sejarahnya dengan menggambarkan mereka seperti tokoh

²⁸*Ibid.*, h. 5.

Islam yang tidak mengenal Syariat Islam.

Dituturkan para Wali Sanga masih menjalankan ajaran Hindu. Masih melakukan bertapa atau berpuasa patigeni, tanpa makan sahur dan berbuka. Bertapa di gunung atau di hutan atau di pinggir kali dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga tidak sempat lagi menjalankan shalat lima waktu. Didongengkan juga karena Wali Sanga sebagai tokoh Islam yang sudah ma'rifat, tidak perlu menjalankan Syariat Islam. Para Wali Sanga juga dituturkan sebagai pemimpin umat yang tidak memahami nilai-nilai kewiraniagaan atau kewirausahaan Islam. Wali Songo sebagai Ulama yang tingkah laku ibadahnya sama seperti Brahmana Hindu dan Bhiksu Buddha tidak mengenal masalah niaga dan tidak mau menyeberang lautan.²⁹

Dengan kata lain, Wali Songo didongengkan atas nama Islam, tetapi isi ajarannya tetap Hindu atau Buddha. Padahal, kata Ahmad Mansur Suryanegara, antara dongeng dan realita keaslian ajaran sejarahnya Wali Songo tidak demikian. Mereka tetap shalat dan membangun Masjid serta melakukan perniagaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan, Sunan Gunung Djati atau Syarif Hidayatullah bersama menantunya, Fatahillah atau Faletihan memimpin perlawanan bersenjata terhadap imperialis Kerajaan Katolik Portugis guna merebut kembali pelabuhan niaga Sunda Kalapa atau Jayakarta, pada tanggal 22 Juni 1527 M, atau tanggal 22 Ramadhan 933 H.

Kemenangan Wali Songo ini berhasil menggagalkan upaya imperialsme Katolik yang akan menegakkan penjajahannya di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, Sunan Gunung Djati akhirnya mangganti nama Pelabuhan Kelapa dengan Jayakarta atau Jakarta, atau dalam bahasa arabnya 'Fathan Mubina' yang

²⁹*Ibid.*, h. 6.

bararti Kemenangan Paripurna, yang terinspirasi dari Q.S Al-Fath 48: 1. Saat ini, nama Jakarta sendiri menjadi nama ibu kota Republik Indonesia.

Adapun dampak dari pendistorsian sejarah Wali Songo di atas terhadap masyarakat pembaca melahirkan aliran Kedjawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat, aliran Kesunden, yang menolak ajaran Syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan lebih mengutamakan “ajaran leluhur atau nenek moyang”. Kemudian tingkah laku berikutnya, meninggalkan ajaran Islam dan aktivitas pasarnya.

Dampak yang demikian, menurut Lucian W. Pye dalam buku *Southeast Asia's Political Systems*, memang menjadi target dan strategi pemerintah kolonial Belanda.

Target lain yang diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, hilangnya kesadaran umat Islam dalam menguasai pasar. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda, melalui penulisan sejarah, dibantu oleh orang bayarannya, menuliskan Sejarah Indonesia yang telah didistorsikan. Banyak Ulama yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu perjuangan bangsa dan negaranya.³⁰

3) Peta Bumi

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Pada Peta Bumi karya Al Biruni, 973-1048 M, pakar geografi Muslim menuliskan nama Samudra India sebenarnya adalah Samudra Persia nama sebelumnya. Hanya setelah negara imperialis Barat berkuasa, digantikanlah namanya menjadi Samudra India. Demikian pula nol meridian semula melintasi Makkah,

³⁰*Ibid.*, h. 6-7.

sebagai petunjuk arah Kiblat. Kemudian oleh Kerajaan Protestan Anglikan Inggris dialihkan melewati Greenwich London. Dari sinilah ditentukan mata angin posisi wilayah atau suatu negara dalam membaca Peta Bumi. Misalnya, Jepang, Cina, Korea letak geografinya di sebelah Timur dari Greenwich London, dan sangat jauh, disebutnya *the Far East*. Demikian pula posisi geografi Makkah dan Madinah sebenarnya terletak di sebelah Barat dari Indonesia.³¹

Nama-nama pulau, samudra, semenanjung, bukit, semula banyak menggunakan istilah atau nama dengan bahasa Arab. Hal ini kata Ahmad Mansur Suryanegara, dikarenakan peta bumi waktu itu merupakan karya pakar geografi muslim dan Arab. Dengan adanya nama-nama wilayah atau tempat yang menggunakan bahasa Arab, memberikan gambaran kepada kita betapa luasnya wilayah pengaruh Islam pada masa itu, sehingga memasuki daratan Eropa dan Asia Tenggara.

Selain fakta di atas, terdapat pula upaya deislamisasi sejarah Islam di Indonesia. Sulaiman as-Sirafi misalnya, wirausahawan Muslim dari Persia yang pernah mengunjungi Nusantara mengatakan bahwa pada abad kedua Hijriyah, di Sula atau Sulawesi terdapat wirausahawan atau pedagang Muslim. Adapun perdagangan utama di Indonesia Timur saat itu adalah rempah-rempah dan wangi-wangian. Kedua komoditi tersebut terdapat di Maluku dan sekitarnya. Keduanya sangat menarik pedagang-pedagang Islam atau wirausahawan Muslim dari Timur Tengah.

³¹*Ibid.*, h. 4.

Keterangan atau sumber sejarah ini hampir langka digunakan oleh para sejarawan.

Akibatnya, di Nusantara Indonesia pun, terdapat nama-nama wilayah darat dan laut atau danau yang berbahasa Arab. Misalnya Jazirah Maluku disebut demikian karena berasal dari Jazirah Al-Muluk. Di Jazirah atau wilayah yang dikelilingi laut tersebut, dikuasai oleh para raja atau almuluk. Pulau Sumatra disebut pula dengan Andalusia, artinya memiliki keindahan dan kesuburan, sama dengan Spanyol karena itu disebut sebagai Andalusia oleh Mu'awiyah. Danau Toba berasal dari Thayyiba artinya indah dalam bahasa Arab.³²

Dengan banyaknya nama wilayah berbahasa Arab dan banyaknya daerah hunian wirausahawan Islam dari Banda Aceh hingga Pulau Banda sebagai bukti Indonesia sudah mengadakan hubungan niaga dengan Arabia. Namun, dalam penulisan Sejarah Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda sering disebut sebatas hubungan niaga Timur Tengah dengan India dan Cina, tanpa disebutkan Nusantara Indonesia. Menurut Ahmad Mansu Suryanegara, hal ini sebagai dampak dari sistem penulisan sejarah yang berdasarkan *Neerlando Sentrisme* yakni ditulis dari sudut pandang dan peran Belanda.

4) Kesultanan Islam

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Indonesia yang posisi wilayahnya yang berada di antara pengaruh kekuasaan politik Islam pada waktu itu, yakni Khulafaur Rasyidin, Dinasti Abbasiyah, Umayyah, Fathimiyah, Utsmaniyah (Turki), Mongol atau Moghul di India, serta muslim di Cina, tidak mungkin menjadikan wilayah Indonesia sebagai

³²*Ibid.*, h. 30-31.

negara yang tertutup (*solated country*). Sebaliknya, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap kehadiran budaya asing yang datang dari luar.

Pengaruh dari perkembangan kekuasaan politik dari ajaran Islam di Timur Tengah, India, dan Cina, lahirlah kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia dan sekitarnya, yaitu Leran, Samodra Pasai, Aceh, Demak, Pajang. Mataram, Cirebon, Banten, Jayakarta, Sumedang, Pontianak, Sambas, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Ambon, Jailolo, Bacan, Malaka, dan Brunei. Kekuasaan politik Islam tersebut menggantikan kekuasaan politik atau Kerajaan Hindu dan Buddha (sebelumnya), yaitu Taroemanegara, Koetai, Padjadjaran, Talaga, Soemedang, Galoeh, Mataram I, Medang Kamolan, Toemapel - Singasari, Daha, Kediri, Blambangan, Madjapahit, Tandjoengpoera, Sriwidjaja.³³

Umumnya, dalam penulisan sejarah Indonesia, adanya kesultanan Islam (kekuasaan Islam) di Indonesia, dituliskan terjadi sesudah runtuhnya Kerajaan Hindu Majapahit. Padahal, kata Ahmad Mansur Suryanegara, Kerajaan Hindu Majapahit sendiri dalam sejarahnya didirikan pada tahun 1294 M atau abad ke-13 M. Yakni, sembilan belas tahun sebelum berdirinya Kerajaan Majapahit di Sumatra sudah lebih dulu berdiri Kesultanan Islam, yakni Samudra Pasai pada tahun 1275 M. Selain itu, pada abad ke-9 M, di Aceh telah berdiri kekuasaan politik Islam, yakni Kesultanan Aceh. Tidak dijelaskan juga bahwa di Leran Gresik, Jawa

³³*Ibid.*, h. 89-91.

Timur sendiri telah terdapat nisan Sultanah Fatimah binti Maimun Hibatullah yang wafat pada abad ke-11 M.

Hal ini tentu membuktikan bahwa Islam lebih dulu hadir ke Indonesia dengan berdirinya kesultanan Samudra Pasai dan Aceh, sekaligus membantah anggapan bahwa politik Islam atau kesultanan di Indonesia terjadi sesudah Kerajaan Hindu Majapahit runtuh.

Pada umumnya, keruntuhan Kerajaan Hindu Majapahit sering didongengkan akibat serangan dari Kerajaan Islam Demak. Padahal, realitas sejarahnya yang benar Kerajaan Hindu Majapahit runtuh akibat serangan Radja Girindrawandhana dari Kerajaan Hindu Kediri pada 1478 M. Keduanya adalah sama sebagai Kerajaan Hindu. Serangan Kerajaan Hindu Kediri di bawah Girindrawardhana terhadap Kerajaan Hindu Majapahit 1478 M, sebagai serangan balasan terhadap serangan Widjaja, pembangun Kerajaan Hindu Majapahit terhadap Kerajaan Hindu Kediri pada saat dipimpin oleh Raja Praboe Djajakatwang, 1292 M. Serangan Widjaja terhadap Kerajaan Hindu Kediri tersebut dengan menggunakan tentara Kubilai Khan.³⁴

Adapun tujuan kedatangan tentara Kubilai Khan tersebut ingin menyerang Raja Kartanegara yang melakukan penghinaan terhadap utusannya, Meng Ki yang dipotong telinganya. Namun, tidak mengerti Raja Kertanegara sudah tidak berkuasa lagi. Ketidak pengertiannya dimanfaatkan oleh Widjaja untuk menyerang Kerajaan Hindu Kediri dengan rajanya Drajakatwang, 1292 M. Sekitar dua ratus tahun kemudian, pada abad ke-15 atau 1478 M, Kerajaan Hindu Kediri di bawah Raja Girindrawardhana melancarkan serangan balasan, meruntuhkan Kerajaan Hindu Majapahit.

³⁴*Ibid.*, h. 122.

5) Nativisme Hindu-Budha

Bentuk deislamisasi sejarah Islam di Indonesia lainnya menurut Ahmad Mansur adalah, sejarawan Barat menyanjung dengan istilah zaman keemasan dan kejayaan untuk kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Digambarkan Islam bukan *rahmatan lil alamin*. Melainkan Islam mendatangkan perpecahan. Sebaliknya, sekeping prasasti dijadikan sumber pembahasan sejarah tentang kejayaan dari zaman keemasan kekuasaan politik Hindu atau Buddha di Indonesia.

Naskah berisikan sejarah Islam dan masjid yang sangat besar jumlahnya di seluruh Nusantara Indonesia tidak dinilai sebagai bukti keberhasilan Islam dalam pengembangan martabat dan memperadabkan bangsa Indonesia di Nusantara. Landasan filosofi deislamisasi penulisan sejarah Indonesia menjadi sumber sebab Islam dan Ulama serta santri terpojokkan dalam penulisan sejarah Indonesia dan dalam Diorama di Monumen Nasional.³⁵

Dalam upaya memenuhi kepentingan menegakkan imperialisme modern tersebut, Kerajaan Protestan Belanda mendatangkan beberapa sarjana untuk memahami lebih dalam sejarah budaya bangsa Indonesia. Menurut B.H.M. Vlekke dalam buku *Nusantara A History of Indonesia*, selain didatangkan C. Snouck Hurgronje guna meneliti Islam Indonesia terutama Islam di Aceh, dihadirkan juga sarjana Belanda guna mengadakan penelitian agama Hindu dan Buddha serta adat.³⁶

Sehubungan dengan hal ini, Lucyan W. Pye menyatakan bahwa dalam upaya melemahkan pengaruh agama Islam, pemerintah kolonial

³⁵*Ibid.*, h. 145.

³⁶*Ibid.*, h. 292.

Belanda mengembangkan aliran-aliran kebatinan.³⁷ Pada masa Orde Baru, istilah aliran ini berubah menjadi aliran kepercayaan.

Aliran Kebatiran dianut oleh para Regent atau Bupati dan bangsawan Jawa yang menampakkan loyalitas yang sangat tinggi kepada pemerintah kolonial Belanda dan mempertahankan hukum adat, tetapi minus dari pengaruh hukum syariah. Hal ini berbeda dengan Ulama dan santri yang bersikap konsisten melancarkan Perang Sabil dalam menegakkan hukum Islam, sebagai jawaban terhadap tantangan penjajah Barat yang melanjutkan Perang Salib (*Crusade*) dan Politik Kristenisasinya.

Clifford Geertz dalam buku *The Religion of Java*, menyebut Aliran Kepercayaan dengan istilah agama Jawa atau Kedjawen, seperti yang disebutkan dalam Kongres Boedi Oetomo. Aliran Kedjawen sebenarnya sudah ada pada masa Wali Songo. Seperti yang di angkat oleh G.W.J.Drewes dalam *An Early Javanese Code of Muslim Ethics*, yang ditulis berdasarkan peninggalan ajaran Sunan Bonang yang ditulis di atas 23 buah daun lontar. Isinya mengingatkan tentang kebenaran ajaran Islam dan juga memperingatkan jangan terpengaruh ajaran Kedjawen yang dinilai sebagai ajaran kafir.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, pemerintah kolonial Belanda, tidak hanya ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam, tetapi juga bertujuan “menaklukkan” Ulama dan Santrinya. Di samping tu,

³⁷Lihat dalam buku *Southeast Asia's Political Systems* karya Lucyan W. Pye.

pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan penelitian ajaran agama Hindu dan Budhha. Adapun tujuan penelitian tersebut, dapat dipastikan akan digunakan pula sebagai media pelaksanaan *divide and rule*.³⁸

Dari upaya rekonstruksi sejarah, pemugaran candi dan patung, serta pembacaan ulang prasasti Hindu-Buddha, ditargetkan akan memudahkan upaya menghidupkan kembali ajaran Hindu-Buddha, yang akan menggeser pengaruh ajaran Islam dan hukum Islam, serta melemahkan pengaruh Ulama. Dengan lemahnya pengaruh Ulama, keberadaan pemerintah kolonial Belanda akan aman dan tidak lagi menemui perlawanan karena kalangan penganut Hindu-Buddha ditargetkan akan berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda.

Tentu rencana yang demikian ini tidak realistis. Hal ini karena penganut Hindu dan Buddha di India, Burma, Vietnam sebagai pembangkit gerakan nasional di negerinya. Mereka pun tertindas oleh penjajah Barat. Selain itu, jarak antara Nusantara Indonesia dengan negara-negara tersebut relatif dekat. Penganut agama Hindu dan Buddha, akan bersikap sama terhadap penjajah Barat.

Di sisi lain, pengaruh selanjutnya dapat dilihat terhadap sistem orientasi politik dan sejarah para pelajar dan sarjana hasil pendidikan Barat. Mereka menjadi cenderung lebih mengagumi nilai-nilai budaya Hindu dan Buddha serta ideologi politik Barat.

Pemerintah kolonial Belanda dan para pakarnya, melakukan distorsi pemahaman dan interpretasi sejarah Indonesia.

³⁸Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid I*, h. 293.

Orientasinya lebih Hindu-Buddha Sentrisme dan Neerlandosentrisme. Artinya, dalam membaca gerak sejarah mayoritas bangsa Indonesia yang telah beragama Islam, mereka bertolak dari tinjauan Hindu, Buddha, atau Belanda. Dampaknya, peran Ulama dan Santri dikecilkan dalam tulisan sejarah Indonesia. Selain itu, isi tulisan Nusanantara A History of Indonesia hanya berupa sejarah Gubernur Jenderal Belanda dan Inggris penindas Islam.³⁹

Akibat pandangan yang berdasarkan Hindu-Buddha Sentrisme, maka hasil analisisnya mengalahkan fakta sejarah berupa ribuan masjid, surau, langgar, dan kesultanan-kesultanan Islam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi sejarah Islam Indonesia tersebut dikecilkan. Sedangkan candi dan patung peninggalan Hindu dan Buddha yang sebenarnya hanya terdapat di sebagian kecil wilayah Indonesia. Penganutnya pun sebagai minoritas. Namun, penulisan sejarah Hindu-Buddha tersebut dibesar-besarkan, jauh lebih besar dari pada Islam.

Disebutnya zaman Hindu-Buddha sebagai zaman kejayaan dan keemasan. Sebaliknya, Islam yang telah menyebar ke seluruh Nusantara dan mampu melancarkan perlawanan terhadap penjajah Barat, dinilai sebagai zaman perpecahan. Tidak pula dibicarakan masalah partisipasi umat Islam dalam menegakkan kedaulatan bangsa dan negara atau yang dikenal dengan istilah *ipoleksosbud hankam*.⁴⁰

Hal ini seperti yang dicontohkan oleh Karel A. Steenbrink tentang tulisan Zoetmulder, dalam buku *Die Religionen Indonesiens*. yang menuturkan tentang agama-agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan bertolak dari pandangan Hindu-Buddha Sentrisme, maka isinya seperti yang dikemukakan oleh Karel A. Steenbrink (1984) dalam *Beberapa Aspek tentang Islam di*

³⁹*Ibid.*, h. 295-296.

⁴⁰*Ibid.*, h. 296.

Indonesia Abad Ke-19, yakni terdapat ketimpangan sistem penulisan. Agama Hindu dan Buddha dibicarakan secara luas. Sebaliknya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia dituliskan hanya 30 halaman saja. Sementara itu, tidak pula dibicarakan masalah kekuasaan politik Islam. Oleh karenanya, tidak terdapat di dalamnya masalah Perang Diponegoro maupun masalah Sjarikat Islam. Dengan sengaja mendistorsikan Islam sebagai agama yang hanya mengajarkan masalah ritual semata. Yakni, di dalamnya tidak terdapat pembicaraan tentang pengaruh ajaran Islam di bidang ekonomi, politik, dan budaya.⁴¹

Deislamisasi dalam penulisan sejarah Indonesia seperti ini merupakan salah satu strategi pemerintah kolonial Belanda dalam menghambat dakwah umat Islam, seperti dengan membesar-besarkan Hindu dan Buddha dan mendistorsikan tentang Islam. Padahal realitas sejarahnya, sekalipun Hindu-Buddha sangat kecil pengaruhnya pada masyarakat Indonesia, tetapi dibesar-besarkan dan dinilai positif. Ditafsirkanlah bahwa, Hindu-Buddha melahirkan “zaman keemasan” bagi Indonesia.

Dapat dipahami mengapa sejarawan Belanda melakukan distorsi sejarah Islam. Hal ini dikarenakan Hindu-Buddha tidak pernah melancarkan perlawanan terhadap imperialis Barat yang menjajah bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah menganut agama Islam.

⁴¹*Ibid.*, h. 296.

Walaupun pengaruh Islam sangat besar pada mayoritas masyarakat Indonesia diinterpretasikan oleh sebagian sejarawan Barat sebagai pengaruh Hindu Buddha, Hal ini terjadi karena Ulama dan Santri tidak henti-hentinya melancarkan perlawanan terhadap upaya penjajah Barat di Nusantara Indonesia. Apakah benar Hindu Buddha sangat besar pengaruhnya terhadap budaya bangsa Indonesia? Sebenarnya, rakyat tidak ada yang mengerti tulisan Pallawa atau Huruf Pra Nagari. Rakyat juga tidak memahami bahasa Sansekerta. Sangat terbatas yang mampu memahami kedua tulisan tersebut. Sangat terbatas pula yang memahami bahasa Sansekerta, sekalipun sarjana Sastra dan Bahasa Timur. Artinya, sekalipun para sarjana Sastra dan Bahasa Timur Sunda dan Jawa, sangat sedikit sekali yang memaham bahasa Sansekerta.⁴²

Dapat dipahami juga kenapa masyarakat Indonesia tidak memahami bahasa Sansekerta, karena dalam ajaran Hindu-Buddha sendiri, hanya kalangan Brahmana dan Bhiksu yang dibolehkan memahami ajarannya. Yakni, bagi orang awam tidak dibenarkan untuk membaca dan mengartikan sendiri ajarannya. Hal ini berbanding terbalik dengan Islam, yang mengajarkan bahwa setiap individu penganut agama Islam diberikan kewenangan untuk menyampaikan ajaran walaupun baru satu ayat, asalkan bersumber dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, setiap individu penganut Islam, ditumbuhkan rasa bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam mengenalkan ajaran Islam. Hal yang demikian inilah, menjadikan sebab umumnya rakyat pada masa penjajahan mampu membaca huruf Al-Qur'an dan huruf Arab Melayu. Secara sederhana pula mampu berbahasa Melayu daripada berbahasa Sansekerta.

Berdasarkan fakta tersebut, ajaran Islam telah dipahami jauh lebih besar pengaruhnya terhadap kebudayaan budaya pribumi daripada ajaran

⁴²*Ibid.*, h. 296.

Hindu dan Buddha yang hanya dikuasai oleh sebagian kecil kaum bangsawan, serta para Pedanda dan Bhiksu. Kemudian, Islam tidak mengajarkan adanya kasta dan tidak mengenal pula Ulama memonopoli pemahaman ajaran. Hal ini pula yang menjadikan Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia.⁴³

6) Kekuasaan Politik Islam

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, dalam penulisan sejarah Islam versi orientalis Barat, dikatakan bahwa Islam dikembangkan dengan pedang. Tuduhan ini diarahkan kepada para pemimpin Islam di setiap awal munculnya kekuasaan politik Islam. Yakni, dibuatkan suatu tulisan yang menuturkan bahwa antar pemuka Islam saling membunuh, yang diikuti pula dengan *story teller* (tukang dongeng) dengan penuturan yang provokatif. Apalagi saat itu, untuk menerbitkan buku atau tulisan sangat sulit, kalau pun ada sangat sedikit. Sehingga untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang mendiskreditkan umat Islam tidak bisa dilakukan melalui buku ataupun tulisan.

Dapat dibaca teknik penulisan sejarah Islam pada setiap periode awal timbulnya kekuasaan politik Islam dan di wilayah yang baru, dikisahkan dari periode Khulafaur Rasyidin. Pada saat itu, dituliskan para Khulafaur Rasyidin saling membunuh. Ditambahkan pula bahwa Sayyidina Ali ra berperang melawan istri Rasulullah SAW, Siti Arsyah ra, Ummul Mukminin ? Benarkah penulisan atau penuturan ini? Apakah benar, Sayyidina Ali ra yang berakhlak mulia tidak menghormati ummul mukminin dan sebaliknya, keduanya dituturkan saling berperang? Benarkah para Sahabat Rasul berambisi besar dengan kekuasaan dan dalam merealisasikan ambisinya itu dengan pembunuhan?⁴⁴

⁴³*Ibid.*, h. 298.

⁴⁴*Ibid.*, h. 144.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, walaupun penulisan tentang sejarah Islam telah lama beredar dan disertai dengan hadits yang bernilai shahih dilengkapi pula dengan referensi penulis sejarah pada zamannya yang dijadikan sumber referensi terpercaya, penulisan tentang sejarah tersebut perlu diteliti dan dikaji ulang. Karena terlalu lama umat Islam disuguhi kisah sejarah bohong yang berdampak lahirnya perpecahan antar Umat Islam yang berkepanjangan. Sayangnya, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, para Ulama lebih reaktif dalam masalah fiqih daripada masalah sejarah.⁴⁵

Sistem penulisan yang demikian, yakni terjadi saling membunuh antar pemimpin Islam, juga dijadikan pola penulisan untuk sejarah Islam di Indonesia atau di wilayah lainnya. Misalnya, kisah sejarah Islam Kesultanan Demak yang dituliskan terjadi perebutan kekuasaan atau saling bunuh antar keluarga Sultan.⁴⁶

Mirip seperti yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Proses melengserkan Soeltan di Kesoeltanan Demak dengan cara pembunuhan, didukung oleh seseorang dari Wali Songo. Atau antar Wali Songo punya kandidat Soeltan yang perlu dipertahankan dengan menyingkirkan saingannya melalui pembunuhan. Benarkah kisah sejarah ini? Dari mana dan apa sumbernya? Jawabnya dari dongeng. Siapa yang memproduksi dongeng tersebut? Pemilik teori dari kalangan Orientalis bahwa Islam dikembangkan dengan pedang.⁴⁷

Akibat dari penulisan sejarah yang didistorsikan seperti demikian, menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, sehingga menimbulkan kesan negatif bahwa Islam memang benar menimbulkan perpecahan.

⁴⁵*Ibid.*, h. 144.

⁴⁶Imron Abu Amar, *Sejarah Ringkas Islam Demak*, (Menara Kudus: Kudus, 1996), h.

⁴⁷Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 145.

Padahal realitas fakta yang terjadi belum tentu seperti yang mereka sangkakan tersebut. Namun, karena sudah terlanjur dibaca oleh masyarakat dan sudah diwariskan turun-temurun, akhirnya kisah seperti itu dianggap sebagai sebuah kebenaran sejarah.

d. Balatentara Jepang Masuk Ke Indonesia

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, berkat keteguhan Ulama dan Santri dalam membina *character and national building*, kita dapat menyaksikan keruntuhan segenap kekuasaan imperialis Barat. Diawali dengan menyerahnya imperialis Barat pemerintah kolonial Belanda kepada imperialis Timur: pemerintah balatentara Jepang. Sikap keteguhan ulama dalam Madjlis Islam A'la Indonesia (MIA) dan pimpinan politik Partai Syarikat Islam Indonesia (P.S.I) serta Partai Islam Indonesia (P.I.I) adalah tidak mau mendukung sikap politik Partai Indonesia Raja (Parindra), Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), Partai Kristen dan Partai Katolik yang berusaha mempertahankan penjajahan dengan menyadarkan rakyat agar tetap setia kepada pemerintah kolonial Belanda.⁴⁸

Jumlah sumber daya yang dimiliki oleh Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu, yang ditunjang dengan kekuatan tentaranya dalam operasi yang tak kenal belas kasihan, tidak mempunyai potensi apa pun ketika berhadapan dengan tentara Jepang. Belanda menyerah tanpa daya bersama para pembantu setianya

⁴⁸*Ibid.*, h. 279.

kepada bangsa kulit berwarna, Jepang.

Tentara Jepang memahami bahwa bangsa Asia dan Pasifik memiliki kultur yang sangat beragam. Oleh karena itulah, untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia, Jepang menyiapkan propaganda yang dimaksudkan untuk mengubah pandangan Ulama dan umat Islam terhadap Kerajaan Shinto Jepang. Propaganda tersebut diawali dengan pendirian masjid di Kobe sejak tahun 1935 M, yang merupakan masjid pertama di Jepang. Kemudian tak berselang lama, pada tahun 1938 M, dilakukan pendirian masjid di Tokyo, yang diikuti dengan pendirian Perserikatan Islam Jepang pada tahun 1938 M. Organisasi Islam Jepang tersebut dipimpin oleh Jenderal Senjuro Hayashi yang dikenal sebagai Bapak Islam Jepang. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Harry J. Benda, dalam buku *Bulan Sabit Dan Matahari Terbit*.

Demi menarik perhatian pimpinan umat Islam Timur Tengah, pada saat pembukaan Masjid Kobe tersebut, Kerajaan Jepang mengundang Pangeran Husein dari negara Yaman. Di samping itu, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, pada tanggal 5-29 November 1939 M, Jepang mengadakan Pameran Islam di Tokyo. Pameran ini diadakan sebulan setelah penyerbuan Jerman ke Polandia pada September 1939 M. Adapun tujuan diadakannya pameran ini adalah untuk menarik simpati umat Islam Indonesia. Oleh karenanya, Kerajaan Jepang pun mengundang para pimpinan Madjlis Islam A'la Indonesia (MIAI), beserta eluruh biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh panitia pameran.

Dalam upayanya menanggapi undangan di atas, Madjlis Islam A'la Indonesia mengirim beberapa orang utusannya yang terdiri dari: Abdoel Kahar Moezakkir, Mr. Kasat, Faried Ma'roef, Machfoed Siddiq, dan Abdoellah Al Moedi. Undangan pameran ini merupakan peristiwa pertama pemindahan pandangan umat Islam Indonesia dari Timur Tengah ke negeri matahari terbit.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, selama berada di Jepang, para Ulama dan pimpinan partai politik Islam Indonesia diperlakukan dengan baik oleh Kekaisaran Jepang. Hal ini sangat jauh berbeda dengan perlakuan pemerintah kolonial Belanda yang selalu bersikap menindas Ulama atau pimpinan partai Islam.

Meskipun dari segi agama, Jepang tidak mungkin berhasil menjadikan negaranya sebagai pusat dunia Islam. Namun, dalam propagandanya disebut adanya kesamaan antara ajaran Shinto dan Islam. Bahkan, dalam propagandanya sangat berani menyatakan bahwa Kaisar Hirohito akan beralih agama memeluk agama Islam.⁴⁹

Strategi propaganda ini, sangat menyentuh perasaan umat Islam. Kekaisaran Shinto Jepang pun mengikuti apa yang diputuskan oleh Kongres Al Islam Indonesia - KAIH atau Kongres Moeslimin Indonesia dan Madjlis Islam A'la Indonesia. Antara lain, tentang Bendera Merah Putih. Oleh karena itu, Jepang juga mempropagandakan dukungannya terhadap pengibaran Bendera Merah Putih.

Pengaruh propaganda Jepang ini dapat dilihat pada perkembangan

⁴⁹Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri Dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jilid II, (Penerbit Surya Dinasti: Bandung, 2016) h. 14.

sikap para pimpinan partai politik Islam dan Ulama. Apalagi setelah tentara Jepang mampu menaklukkan pemerintah kolonial Belanda dalam Kapitulasi Kaljati pada 8 Maret 1942 H. Peristiwa runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda oleh tentara Jepang ini, menurut penuturan Harry J. Benda, rakyat Indonesia merasa benar-benar terbebas dari penjajahan pemerintahan Kristen yang berabad-abad menindas umat Islam.⁵⁰

Apalagi disertai dengan pembebasan Abdoel Karim Amroellah dari pembuangannya di Sukabumi. Diikuti pembebasan pimpinan nasional lainnya Soekarno dari Bengkulu, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir dari Banda, menjadikan hati rakyat Indonesia terbuka terhadap kehadiran tentara Jepang.

Propaganda tentara Jepang ini jauh lebih terarah kepada Ulama. Terutama diarahkan kepada Ulama di desa-desa. Propaganda ini jauh lebih berhasil daripada propaganda Jerman atas Ulama di Timur Tengah. Walaupun pada waktu itu berita pembinasaaan bangsa Yahudi sangat dipahami oleh Ulama di Timur Tengah. Namun, Jerman gagal dalam pendekatan keagamaannya, yang lebih menampilkan kekuatan militernya daripada dukungan dan penghormatannya terhadap umat Islam. Pada saat itu umat Islam merasakan pembinasaaan Yahudi, bukan untuk membantu umat Islam dalam menghadapi lawan agamanya, melainkan hanya permasalahan rasial. Meniadakan bangsa Yahudi karena agamanya mengajarkan bahwa bangsa Yahudi sebagai bangsa yang terpilih.

⁵⁰Benda, Harry J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*. Terjemahan oleh Daniel Dhakidae. (Pustaka Jaya: Jakarta. 1980), h. 139.

Keyakinan bangsa Yahudi ini sangat bertentangan dengan upaya membangkitkan kesadaran bangsa Jerman dalam propagandanya *deutschfand uber alfes*.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Jepang sangat takut, kegagalan Jerman juga terjadi di Indonesia. Apalagi di Timur Tengah, Sekutu berhasil menjadikan umat Islam tidak berpihak pada Pakta Pertahanan Poros - *Axist Pact*. Oleh karena itu, strategi propaganda tentara Jepang ini diarahkan kepada Ulama di desa.

Pendekatan politik tentara Jepang kepada Ulama di desa ini oleh Harry J. Benda disebut sebagai *Nippon's Islamic Grass Roots Policy*. Pendekatan ini hanya akan berhasil jika pimpinan dan sistem kepartaian diubah. Walaupun dalam propagandanya tidak disebut tentang rencana pemerintah tentara Jepang yang akan membubarkan seluruh partai politik yang didirikan pada masa Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia.⁵¹

1) Pembentukan Tentara PETA

Menurut Ahmad Mansu Suryanegara, dalam upaya mempertahankan eksistensinya, kaum penjajah selalu membangun tentara yang berasal dari rakyat jajahannya, termasuk pada masa VOC di Indonesia, dan EIC di India. Demikian juga halnya pada masa pendudukan tentara Jepang di Indonesia, yang berusaha untuk memperkuat basis pertahanannya dalam menghadang serangan balik Tentara Sekutu, yaitu dengan membentuk Tentara Pribumi. Di bawah perubahan tantangan ini,

⁵¹Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah Jilid II*, h. 15-16.

para Ulama dan Santri dituntut untuk dapat memilih dan memberikan jawaban bijaksana di tengah Perang Asia Timur Raya. Sejalan dengan situasi Perang Dunia II, pilihan utama jawaban ulama adalah membangkitkan semangat keprajuritan bangsa melalui tentara Pembela Tanah Air (Peta).⁵²

Menurut Nugroho Notosusanto, sebelum pembentukan Tentara Pribumi, ditugaskan terlebih dahulu kepada Kolonel Susumu Nishiura untuk mempelajari bagaimana Perancis menggunakan tentara Pribumi bangsa Maroko dalam mempertahankan jajahannya. Selanjutnya, Nugroho Notosusanto menjelaskan untuk merealisasikan upaya pembentukan tentara Pribumi ini diserahkan kepada Beppan, yaitu Seksi Khusus Dinas Intelijen Jepang.⁵³

Dicobanya terlebih dahulu dengan membangun Pusat Latihan Pemuda - Seinen Dojo di Tangerang dan dilatihlah 50 pemuda, Januari 1943. Semula dipimpin oleh Mayor Kuniya, Kepala Intelijen Tentara Keenam Belas Kemudian digantikan oleh Kapten Maruzaki. Pelaksanaan selanjutnya dipimpin oleh Letnan Satu Yanagawa. Adapun para pemuda yang dilatih tersebut, antara lain: Soeprijadi, Jonosewojo, Soeprpto, Daan Mogot, Zoelkifli Loebis, Abdoellah Saleh, Moetakat Hoerip, Kemal Idris, Oemar Wiranatakoesoemah, Anur Mahmoed, Mansoer, Soebito, Roekmimto Hendraningrat.⁵⁴

Hasil dari latihan Seinen Dojo ini, pada Juni 1943 didemonstrasikan di depan Jenderal Inada. Dari sini, tentara Jepang yakin, perlunya segera merealisasikan pembentukan Tentara Pribumi. Menurut Nugroho Notosusanto berdasarkan keputusan bersama antara Beppan dan

⁵²Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 280.

⁵³Nugroho Notosusanto, *The Peta Army in Indonesia 1943-1945*, (Departement of Defence and Security Centre for Armed Forces History: Jakarta, 1971), h. 6.

⁵⁴Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 56.

pimpinan Tentara Jepang yang beragama Islam, Mohammad Abdul Muniam Inada, Abdul Hamid Ono, serta Letnan Satu Yanagawa diputuskan dibentuk Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang Islami dan dipimpin oleh *Daidancho* (Komandan Batalyon) dari kalangan Ulama.

Perang Asia Timur Raya yang memakan dana yang sangat besar, tidak mungkin Balatentara Jepang dalam membangun Tentara Pribumi dengan biaya yang besar dibebankan kepada Kekaisaran Shinto Jepang sendiri. Untuk mengalihkan tanggung jawabnya, Balatentara Jepang mengondisikan pembentukan Tentara Pribumi sebagai tuntutan Ulama dan diberi nama organisasi kesenjataannya tidak seperti membantu Balatentara Jepang dalam menghadapi perangnya. Melainkan membela tanah air sendiri sehingga diberi nama Tentara Pembela Tanah Air – Peta.⁵⁵

Tuntutan Ulama tersebut kata Ahmad Mansur Suryanegara. disiarkan dalam surat kabar Asia Raja, pada Senin 13 September 2603, No.217 Tahoen II dimuat di halaman depan: *Kaoem Moeslimin Indonesia toeroet meminta berdirinya Barisan Pendjaga Poelau Djawa*. Adapun Ulama Jakarta yang menuntut segera didirikannya Barisan Penjaga Pulau Jawa di atas adalah: K.H. M. Mansur, H. Yakub, K.R. H. Adnan, H.A.K. Amarullah, H. Mansur, K.H. Abdul Madjid, H. Moh. Sodri, H. Cholid, K.H. Junaidi, DAN H. Mochtar.

Kesepuluh Ulama yang berasal dari Jakarta tersebut memberanikan diri mengajukan surat permohonan kepada Letnan Jenderal Kumshiki Harada. Dengan dasar pemahaman bahwa mayoritas masyarakat Pulau Jawa adalah beragama Islam. Kemudian sepuluh Ulama wakil ummat Islam ini datang menyampaikan usulannya kepada Saiko Shikikan Letnan

⁵⁵*Ibid.*, h. 57.

jenderal Kumashiki Harada yang berlangsung di Jakarta pada November 1942-April 1945 M. Para Ulama ini diterima oleh jenderal Mayor Yamamoto Somubucho Kakka. Dalam suratnya, sepuluh Ulama tersebut menyebutkan nama Barisan Pendjaga Poelau Djawa adalah Barisan Pembela Islam. Nama ini muncul karena mayoritas penduduk asli Pulau Jawa adalah Islam.⁵⁶

Pernyataan Sepuluh Ulama ini adalah sebagai gambaran rasa bahagia karena cita-citanya akan membangun Organisasi kesenjaatan modern yang diperjuangkan sejak Kongres Nasional Centrasl Sjarikat Islam di Bandung pada 17-24 Juni 1916 M. *Indie Weertaar*. ditolak oleh pemerintah kolonial Belanda dan Kerajaan Protestan Belanda, tetapi oleh pemerintah tentara Jepang akan segera terwujud.⁵⁷

Dalam pertemuan ini, Jenderal Mayor Yamamoto Somubucho Kakka menyatakan bahwa sejak tentara Dai Nippon mendarat di Pulau Jawa, umat Islam Indonesia menunjukkan sikap saling memercayai. Sikap ini sangat dihargai oleh pemerintah tentara Dai Nippon. Oleh karena itu, surat permohonan tentang pembentukan Barisan Pembela Islam akan segera disampaikan kepada Sasko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada.

Seperti halnya pemerintah kolonial Belanda, tidak mungkin membentuk serdadunya dengan nama Tentara Islam karena serdadunya dibangun atas dasar etnis: Jawa, Batak, Menado dan Ambon dan lain-lainnya. Balatentara Jepang tidak berbeda dengan cara pemerintah kolonial Belanda, berdasarkan Osamu Seirei No 44, Sarko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada pada 3

⁵⁶*Ibid.*, h. 57-58.

⁵⁷*Ibid.*, h. 57-58.

Oktober 2603, memutuskan Tentang Pembentoean Pasoekan soeka-reta oentoek membela Tanah Djawa, antara lain disebutkan dalam Pasal 1: *Mengingat semangat jang berkobar-kobar serta djoega memenoehi keinginan jang sangat dari 50 djoeta di Djawa, jang hendak membela tanah airnja dengan sendiri, maka Balatentara Dai Nippon membentoe Tentara Pembela Tanah Air Ja'ni pasoakan soeka-rela oentoek membela Tanah Djawa dengan pendondoek asli, ialah berdiri atas dasar tjita-tjita membela Asia Timoer Raja bersama-sama.*⁵⁸

Dari Pasal 1 Osamu Seirei No.44 di atas, menurut Ahmad Mansur Suryanegara terbaca Sarko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada dalam melaksanakan tuntutan Sepuluh Ulama dengan membelokkan nama Barisan Pembela Islam diubah menjadi Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Dari isi Osamu Seirei No 44, terbaca pula strategi deislamisasi nama Tentara Pembela Tanah Air. Yaitu, tuntutan Ulama yang semula namanya adalah Barisan Pembela Islam diubah istilahnya menjadi Tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Walaupun demikian, menurut Ahmad Mansur Suryanegara *Daidancho* atau Panji-panji Tentara Pembela Tanah Air masih memuat unsur-unsur keislaman, yakni lambang *Daidancho* dalam bentuk Bulan Bintang Putih yang diletakkan di tengah lambang Matahari Terbit Merah. Tentara Jepang juga tetap mempercayakan sepenuhnya pimpinan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) kepada Ulama. Karena dengan kharismanya,

⁵⁸*Ibid.*, h. 59.

Ulama terbukti mampu memobilisasi santri dan masyarakat mayoritasnya beragama Islam. yang diharapkan dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya - *Dai Toa No Sensho*.

Pataka Tentara Pembela Tanah Air atau Dardanki sebenarnya dibuat oleh Moetakat Hoerip. Dalam penjelasannya, Moetakat Hoerip sebagai pemenang pembuatan lambang yang disebarkan pada saat itu. Moetakat Hoerip mendengar adanya sayembara Daidanki dari Kapten Yanagawa, pada saat Moetakat Hoerip sebagai pelatih calon perwira.⁵⁹

Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di atas, sebagai realisas dari perjuangan sepuluh Ulama yang mengajukan usulan kepada Saiko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada, pada 12 September 1943 M, di Jakarta. Akan tetapi, dalam penulisan sejarah Indonesia, akibat dari strategi penulisan yang bertolak dari deislamisasi Sejarah Indonesia, maka nama-nama Ulama tersebut ditiadakan. Hanya ditulis bahwa Tentara Pembela Tanah Air (PETA) didirikan oleh pemerintah tentara Jepang sebagai perwujudan dari surat permohonan yang dituliskan dengan darah Gatot Mangkoepradja mantan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI). Menurut Nugroho Netosusanto dalam penelitian Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, tidak pernah menemukan adanya surat permohonan yang dituliskan dengan darah Gatot Mangkoepradja tersebut.⁶⁰

2) Gerakan Protes Sosial

Pemerintahan tentara Jepang dikejutkan oleh pelaksanaan *Nippon's Islamic Grass Root Policy* yang berdampak terjadinya Gerakan Pesantren Sukamanah Tasikmalaya yang dipimpin oleh K.H Zainal Moestofa, Kiai

⁵⁹*Ibid.*, h. 59-70.

⁶⁰*Ibid.*, h. 80-81.

Emas, Kiai Damon, Kiai Aip Abdoel Hakim, Kiai Nadjamoedin, Kiai Achmad Hidajat, Hadji Hafid pada tanggal 18 Februari 1944 M. Kemudian diikuti oleh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Indramayu, yang dipimpin oleh Kiai Srengseng, Kiai Kusen, Haji Madrijas dan Haji Kartiwa, pada tanggal 30 Juli 1944 M. Kedua Gerakan Protes Pesantren ini bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia di dalam negeri Islam dan terbebas dari kekuasaan asing (Jepang).

Gerakan protes sosial Pesantren Cimerah Sukamanah tersebut membangkitkan semangat perlawanan Ulama di Indramayu. Tidak takut dengan serangan Bhetzkrieg serangan kilat tentara Jepang yang diikuti dengan pembantaian para santri dan penangkapan ulamanya.

Dapat dipahami bila di wilayah pedesaan Indramayu, akan mudah bangkit semangat perlawanannya. Indramayu dikenal sebagai wilayah yang kurang subur Bahaya kelaparan, wabah penyakit, dan berbagai penderitaan tak dapat dihindari. Hasil sawah ladangnya disita oleh Balatentara Jepang. Padahal saat Balatertara Jepang mendarat di Pulau Jawa melalui salah satu gerbang pendaratannya adalah Eretan Indramayu. Kedatangan Balatentara Jepang disambut oleh para petani sebagai tentara pembebas dari penjajahan Barat. Namun, mengapa setelah pendudukan justru para petani ditindas oleh Balatentara Jepang? Semestinya dengan adanya Nippon's Islamic Grass Roots Policy lebih memperhatikan nasib petani dan Ulama dari desa-desa Indramayu. Tetapi realitasnya justru sebaliknya, terjadi kembali penindasan terhadap petani Indramayu seperti yang pernah dilakukan oleh penjajah Belanda dengan Tanam Paksa (1830-1919 M).⁶¹

Para Ulama tidak tahan lagi melihat rakyatnya menderita, kelaparan di mana-mana, masyarakat banyak yang terserang wabah penyakit, mereka hanya mengenakan baju pakaian seadanya yang terbuat

⁶¹*Ibid.*, h. 73.

dari bekas karung goni. Oleh karenanya, untuk menanggapi hal tersebut, pada tanggal 30 Juli 1944 M, atau bertepatan dengan 9 Syawal 1363 H, pecahlah protes sosial yang dipimpin oleh Kiai Srengseng. Kiai Koesen, Kiai Moekasan, Haji Kartiwa dan Haji Madrijas.

Dalam upayanya membendung pengaruh gerakan protes Pesantren tersebut terhadap masyarakat dan kalangan politisi, selain melaksanakan operasi militer (*blitzkrieg strategy*), yaitu dengan melakukan penangkapan Kiai dan penghancuran Pondok Pesantren, pemerintah Jepang juga melakukan pendekatan sosial sispersos. Pada tanggal 7 September 1944 dalam Sidang Istemewa Teikoku Gikai ke-85, Perdana Menteri Koiso mengumumkan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.

Pengumuman ini disosialisasikan oleh Saiko Sikikan bertepatan dengan hari *Pembangoenan Asia Timoer Raad Jakarta*, pada tanggal 8 September 1944 M, atau bertepatan dengan 20 Ramadhan 1363 H, yang diikuti dengan diizinkan pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di samping itu, Nahdlatul Ulama, Perserikatan Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, Alittihadijul Islamiyah, Persatuan Islam diizinkan aktif kembali.⁶²

Balatentara Dai Nippon sebagai penjajah, tidak mungkin mau mendengar tuntutan para Ulama Indonesia Merdeka berdasarkan Islam. Oleh karena itu, Mahkamah Tentara Jepang Kriegsgencht menjatuhkan hukuman mati kepada K.H. Zainal Moestofa bersama 21 Syuhada.⁶³

Menurut Ahmad Mansu Suryanegara, umumnya dalam penulisan

⁶²*Ibid.*, h. 99.

⁶³*Ibid.*, h. 72.

Sejarah Indonesia, akibat adanya deislamisasi dalam penulisannya, hanya dituliskan K.H. Zainal Moestota dan Kiai Emas yang memberontak melawan tentara Jepang yang manindas para petani Sukamanah Tasilmalaya. Namun, tidak dituliskan gerakan protes sosialnya menuntut Indonesia Merdeka berdasarkan Islam.

3) Penculikan Bung Karno

Menjelang hari-hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terjadi peristiwa penculikan terhadap tokoh Indonesia. Proses penculikan itu terjadi di rumah Bung Karno, yang berlokasi di Jalan Pegangsaan Timur 54, Jakarta. Proses penculikan berlangsung tengah malam, yang dipimpin oleh Soekarno berseragam Tentara Peta dengan pistol dan pisau panjang, serta pemuda lain dengan mengacungkan pedang terhunus ke arah Bung Karno, dan memaksa agar Proklamasi Kemerdekaan dilaksanakan malam itu juga, pada tanggal 15 Agustus 1945. Namun, karena menemui jalan buntu, Bung Karno pun akhirnya menolak permintaan mereka tersebut. Kemudian mereka pun akhirnya mengamankan Soekarno dengan membawanya ke Rengasdengklok.

Boeng Karno, Fatmawati dan Goentoro yang masih bayi, bersama Boeng Hatta, diangkut dengan naik truck terbuka ke Rengasdengklok, bersama 20 Tentara Peta karena di Jakarta di bawah pimpinan Wikana dan Choeroel Soleh akan terjadi pemberontakan besar melawan Balatentara Jepang. Ternyata, di Rengasdengklok tidak pernah terjadi pembicaraan apa pun. Keduanya, Boeng Karno dan Boeng Harto tidak pernah diajak bicara. Pemberontakan besar di Jakarta pun tidak pernah terjadi. Pada keesokan harinya, datanglah Mr Achmad Soebordjo menjemput Boeng Karno, Iboe Fatmowati, Goentoro, Boeng Hatta di Rengasdengklok, untuk kembali ke Jakarta. Menurut penuturan Boeng Hatta, dalam perjalanan Soekarno menampakan rasa

katakutannya yang luar biasa. Petani kurus kaum marhaen yang sedang membakar sampah jerami, asap pembakaran jerami yang terlihat dari jauh, dikatakan revolusi rakyat sudah mulai meletus.⁶⁴

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, bangsa Indonesia pada saat itu sedang berhadapan dengan pelaksanaan keputusan Perjanjian Posdam yang dibuat oleh negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan Perancis, yang berisi kesepakatan bahwa negara Imperialis yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Sekutu mempunyai hak menguasai kembali wilayah atau negara jajahannya.

Akibat Uni Soviet Rusia ikut serta membuat Perjanjian Posdam, dan PKI Sibar di bawah pimpinan Sardjono yang masih di Australia dan sebagai anggota Komunis Internasional - Komintern menginduk ke Rusia maka dampaknya Rusia dan PKI berdasarkan Perjanjian Posdam tersebut menyetujui Kerajaan Protestan Belanda menjajah kembali Indonesia. Dengan demikian, PKI Sibar dibawah Sardjono sebagai anggota Komintern menolak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan bekerja sama dengan Kerajaan Protestan Belanda.⁶⁵

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, akibat pengaruh kondisi politik luar negeri tersebut, terjadilah peristiwa penculikan terhadap tokoh nasional, yaitu; Soekarno dan Mohammad Hatta, bersama Ibu Fatmawati beserta anaknya Guntur yang pada saat itu masih bayi. Peristiwa penculikan ini dicatat dalam sejarah Indonesia, terjadi pada tanggal 15 Agustus 1945 di Rengasdengklok. Penculikan yang dipimpin oleh Wikana dan Chaeroel Saleh, dilaksanakan oleh Tentara PETA yang dipimpin oleh Soekarni. Menurut keterangan Bung Hatta selama ditawan di rumah seorang Cina bernama I Song, Rengasdengklok, tidak terjadi perundingan

⁶⁴Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 148-149.

⁶⁵*Ibid.*, h. 147.

ataupun pembicaraan lain.

Apakah penculikan ini sebagai rekayasa Tan Malaka dari komunis nasional mencoba mengambil kepemimpinan nasional Dwi Tunggal Soekarno Hatta? Sejarah membuktikan, pengguna sistem penculikan dalam memenangkan program politiknya adalah pihak komunis. P.M. Soetan Sjahrir diculik oleh Tan Malaka dalam peristiwa Kudeta, 3 juli 1946.⁶⁶

Selain fakta Kudeta pada 3 Juli 1946, menurut Soeharto, Tan Malaka, menuntut agar dirinya ditunjuk sebagai waris tunggal bila Bung Karno dan Bung Hatta dibunuh atau ditawan oleh Jepang atau Belanda. Bung Karno dan Bung Hatta didesak agar memberikan Testamen Politik. Isinya penyerahan kekuasaan kepada Tan Malaka. Namun, kata Soeharto, kedua Proklamator menolaknya.⁶⁷

4) Proklamasi Kemerdekaan

Menjelang pembacaan Teks Proklamasi, sekitar jam 7 pagi rakyat yang bersenjata bambu runcing dan senjata tajam lainnya sudah berkumpul menunggu dibacakannya teks Proklamasi. Sementara itu, sekitar tujuh puluh prajurit, dan lima orang perwira, Tentara Pembela Tanah Air (PETA) sudah berjaga-jaga mengamankan lokasi, mereka siap menghadapi segala kemungkinan, jika tentara Jepang mencoba menggagalkannya. Sehingga, jalan yang menuju Pegangsaan Timur 56 ditutup oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Menjelang pembacaan Teks Proklamasi kondisi kesehatan Bung Karno fisiknya terganggu. Dia berbaring di kamarnya, yang ditunggu oleh

⁶⁶*Ibid.*, h. 148-149.

⁶⁷Soeharto, *Saksi Sejarah Mengikuti Perjuangan Dwitunggal*. (Gunung Agung: Jakarta:1982), h. 33.

Ibu Fatmawati dan Soeharto. Pagi itu, Bung Hatta belum juga datang. Sehingga Bung Karno didesak oleh para pemuda, untuk segera membacakan Teks Proklamasi. Namun, Bung Karno menolaknya karena sangat kenal dengan sikap Bung Hatta yang selalu tepat waktu. Ternyata benar, Bung Hatta pun akhirnya hadir pukul 10 kurang 5 menit.

Tepat pukul 10.00 pagi, tanggal 17 Agustus 1945 M, Jumat Legi, atau bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1364 H, dibacakanlah Teks Proklamasi oleh Bung Karno, dihadapan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan rakyat, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dengan upacara yang sangat sederhana, tanpa adanya protokoler.

Bendera Merah Putih hasil penyambungannya dengan mesin jahit tangan oleh Ibu Fatmawati, dan dikibarkan di tiang bambu oleh Chudancho Latief Hendraningrat yang berseragam Tentara Pembela Tanah Air (PETA). Kemudian, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Peran Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dalam mengamankan proses pembacaan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 M, dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - PPKI, pada 18 Agustus 1945 M, dalam penulisan Sejarah Indonesia sering tidak dituliskan seperti yang dituturkan oleh Proklamator dalam buku *Bung Karno Penjambung Lidah Rakyat*.⁶⁸

Berita tentang Proklamasi ini disiarkan oleh Sakti Alamsjah, Sam

⁶⁸Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 148-154.

Amir dan Darja melalui Pemancar Radio Malabar, Bandung. Pemancar radio yang berkekuatan tinggi dan mampu menjangkau ke luar negeri tersebut didengar oleh para mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian berita Proklamasi ini berkembang hingga ke mahasiswa di Mesir.

Akibatnya, Mohammad Abdul Mounim, Konsul Jenderal Mesir di Bombay, yang bertindak atas nama Raja Farouk dari Mesir, menyampaikan keputusan Dewan Gabungan Negara-negara Arab berisikan anjuran pada negara-negara anggota gabungan Liga Arab untuk mengakui Republik Indonesia. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Keputusan ini disampaikan kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 4 Maret 1947 M. Kemudian diikuti oleh Lebanon, Juni 1947, Suriah dan Irak, Juli 1947, Afghanistan, September 1947, dan menyusul Saudi Arabia, November 1947.

Ternyata, Proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi, 9 Ramadhan 1364, diakui pertama kalinya oleh negara-negara Islam Timur Tengah. Sebaliknya, sampai 1947, tidak ada satu pun negara-negara penjajah Eropa Barat atau dari negara komunis Eropa Timur yang bersedia mengakuinya. Apalagi Kerajaan Protestan Belanda baru mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah HUT Ke-60 Republik Indonesia.⁶⁹

Proses penyiaran Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui Pemancar Radio Malabar, yang diikuti dengan Bandung Hosokyo, tidak semudah yang dibayangkan oleh generasi sekarang. Selama Perang Asia Timur Raya dan pendudukan tentara Jepang, radio milik rakyat, gelombang luar

⁶⁹*Ibid.*, h.156.

negerinya disegel, dilarang menyatel penyiaran dari radio Negara Sekutu.

Prestasi penyiaran dan pengulangan penyiaran yang dilakukan oleh Sakti Alamsjah, Sam Amir, dan Darja yang menjadikan dunia mengetahui Indonesia Merdeka, merupakan tindakan heroik yang beresiko tinggi, hidup atau mati. Berkat keberhasilan mereka, Negara Sekutu pun akhirnya mengetahui Hindia Belanda bukan lagi menjadi daerah jajahan Kerajaan Protestan Belanda. dan telah berubah menjadi Republik Indonesia.

Sayangnya, peristiwa Proklamasi yang demikian akbar maknanya, sebagai puncak kemenangan perjuangan Ulama dan Santri, yakni terbebasnya bangsa dan negara dari penjajahan Barat dan Timur, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, akibatnya adanya kebijakan deislamisasi dalam Kalender di Indonesia, maka Proklamasi Kemerdekaan dianggap cukup hanya diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus 1945 saja. Sementara itu, setiap tanggal 9 Ramadhan yang bertepatan dengan tanggal Proklamasi Kemerdekaan tersebut, sikap umat Islam Indonesia biasa-biasa saja, dan tidak menjadikannya sebagai tanggal dan bulan syukuran kemerdekaan bangsa Indonesia.

Padahal, Proklamasi benar-benar terjadi pada Puluhan Pertama Ramadhan sebagai Puluhan Rahmat Allah dan terjadi pada rajanya hari, Hari Jumat Dalam Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945, dirumuskan kemerdekaan Indonesia sebagai berkat rachmat Allah Jang Maha Koeasa. Apalagi menurut Presiden Soekarno kepada Cindy Adams, menuturkan gagasan pemilihan tanggal 17 karena angka 17 sebaga sebagai tanggal keramat. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadhan dan Boeng Karno shalat setiap harinya 17 Rakaat. Kemudian sebagai fakta sejarah yang tidak dapat dipungkin, Teks Proklamasi dituliskan oleh Proklamator dan diketik oleh Sajoeti Melik, serta ditanda-tangani kedua Proklamator pada waktu makan sahur shaum Ramadhan 1364.

Boeng Hatta menuturkan makan sahur di rumah Laksamana Maeda. Kemudian Teks Proklamasi dibacakan pada saat Proklamator menjalankan ibadah shaum.⁷⁰

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, selain diperingati setiap 17 Agustus, tidak ada salahnya umat Islam pada setiap tanggal 9 bulan Ramadhan, menjadikan tanggal 9 Ramadhan sebagai tanggal syukuron umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia, yang telah menerima anugerah nikmat kemerdekaan Republik Indonesia dari Allah SWT.

4) Perang Sabil

Perang Kemerdekaan membela Proklamasi 17 Agustus 1945, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh semangat religius yang Islami karena perang dicengkam rasa takut yang kuat. Hanya didorong oleh keyakinan agama, maka akan bangkit keberanian menantang maut. Oleh karena itu, Bung Tomo dalam membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia dalam menghadapi pendaratan Tentara Sekutu Inggris dan tentara NICA yang akan menegakkan kembali penjajahan, melalui Radio Pemberontakan di Surabaya, dibangkitkan dengan Takbir *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar*, dalam penutup pidato radionya.

Mohammad Natsir menjelaskan mengapa Bung Tomo harus meneriakkan Takbir Allahu Akbar dalam menutup pidatonya di Radio Pemberontakan. Jawabnya karena Bung Tomo memahami siapa yang tepat menjadi teman dalam membela tanah air dan bangsa serta agama dari ancaman Tentara Sekutu dan NICA, kecuali Ulama dan umat Islam.

⁷⁰*Ibid.*, h.162.

Setelah Resoloesi Djihad Nahdlatoel Oelama, 22 Oktober 1945, Senin Pahing, 15 Dzulqadah 1364, di Surabaya, berkembang menjadi Resoloesi Djhad Partai Politik Islam Indonesia Masjoermi, 7 November 1945, Rabu Pon, 1 Dzulhyjah 1364, pengaruhnya membangkikan semangat 60 Miljoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berjihad Fi Sabilillah.⁷¹

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, dalam merealisasi Resolusi Jihad tersebut, Kiai Soebhi dari Parakan Magelang, mengubah Bambu Runcing khas Parakan yang tidak berongga, disertai dengan doa, sebagai senjata pembangkit keberanian para Laskar Hizboellah yang ikut serta dalam Perang Kemerdekaan. Kemudian diikuti setiap kota, segenap laskar mempersenjatai dirinya dengan Bambu Runcing. Demikian pula rakyat secara spontan mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam, keris, pedang, tombak, rencong, dan bambu runcing, siap menghadapi serangan Tentara Sekutu Inggris dan NICA.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, dalam penulisan Sejarah Indonesia, nama Kiai Soebhi ditiadakan kemudian disebutkan nama Tan Malaka sebagai pendiri Barisan Bambu Runcing. Padahal, realitas sejarahnya, yang banyak menggunakan Bambu Runcing sebagai senjata khas Kiai Subhi adalah Laskar Hizbullah.

Dengan adanya Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 M, yang bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1364 H, dan panggilan Takbir dari Bung Tomo, hadirilah para Ulama antara lain K.H Hasjim Asj'ari dari Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. KH Asjhari dan Kiai Toenggoel Woeloeng dari Yogyakarta, K H. Abbas dari

⁷¹*Ibid.*, h. 206.

Pesantren Buntet Cirebon dan K.H Moestafa Kamil dari Partai Syarikat Islam (PSI) Garut Jawa Barat, yang ikut serta memimpin perang Palagan Surabaya. Kehadirannya membangkitkan para Ulama untuk berpartisipasi dalam Barisan Sabililah, bersama pemuda dan santri yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Laskar Hizboellah, pada tanggal 2 Oktober 1945, bertujuan menghadang pendaratan Tentara Sekutu dan NICA yang akan menegakkan kembali penjajahan di Indonesia.

M.C. Ricklefs menuturkan pada Oktober dengan mendaratnya Tentara Sekoetoe Inggris dan NICA di Pulau Jawa dan Sumatra, pecahlah pertempuran di Pula Sumatra, Para pemuda Republik menyerang bekas interniran Belanda, bekas Belanda, dan Indo-Eropa yang pro Belanda.⁷²

Menurut Ahmad Mansu Suryanegara, istilah yang digunakan oleh masyarakat dan media cetak terkait perang pada masa itu adalah *Perang Sabil*. Dalam penulisan Sejarah Indonesia tentang Palagan Banyubiru di atas, tidak ada lagi pengakuan terhadap keberhasilan penyerbuan yang dipimpin oleh Kiai Komar dalam Perang Kemerdekaan saat itu karena istilahnya pun tidak lagi menggunakan Perang Sabil, melainkan diganti dengan istilah Palagan Banyubiru. Alasannya, tentu jika masih menggunakan istilah Perang Sabil pasti pelakunya adalah umat Islam, Ulama, dan Santri. Namun, jika menggunakan istilah Palagan artinya tempat berlaga, tidak harus pelakunya umat Islam.⁷³

⁷²*Ibid.*, h. 207-208.

⁷³*Ibid.*, h. 218.

2. Era Kemerdekaan

a. Gerakan Nasionalisme di Indonesia

Memasuki abad ke-20 M (1900-1939 M), muncullah beberapa isme yang timbul pada masa kebangkitan kesadaran nasional Indonesia yang dipelopori oleh Nasionalisme Islam dan diikuti oleh isme kontranya. antara lain:⁷⁴

- 1) Islamisme memelopori bangkitnya kesadaran nasionalisme Islam yaitu Djamiatoel Choir, Al-irsjad, Sjarikat Dagang Islam, Sjarikat Islam, Persjarikatan Moehammadijah, Persjarikatan Oelama, Matka'oe! Anwar, Nahdlatoel Oelama, Nahdlatoel Wathan, Persatoean Moeslimin Indonesia dan Persatoean Islam.
- 2) Djawanisme, Tradisionalisme, Kesoendenisme Boedi Otomo, Serikat Prijaji, Igama Djawa Pasoendan dan Selasa Kliwon Taman Siswa.
- 3) Komunisme dengan ide komunis internasional yaitu Perserikatan Kommunist di India (PKI) diikuti ide komunis nasional.
- 4) Marhaenisme Perserikatan Nasional Indonesia (PNP)
- 5) Kebangsaan Sekuler Partai Indonesia Raja (Parindra) Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, penilaian Barat yang memandang negatif perjuangan nasionalisme dan patriotisme Islam di

⁷⁴Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 256.

Timur Tengah, oleh Kerajaan Protestan Belanda dan pemerintah kolonial Belanda, juga dialamatkan kepada Ulama dan Santri di Indonesia. Sehingga menimbulkan pengertian betapa sulitnya untuk mengartikan istilah nasionalisme dan patriotisme jika dikaitkan dengan perjuangan Ulama dan Santri dalam membebaskan tanah air, bangsa dan agama dari penindasan imperialis Barat. Baik terhadap imperialis Katolik ataupun terhadap imperialis Protestan.

Hal ini dikarenakan istilah nasionalisme dan patriotisme diartikan memang sama maknanya sebagai gerakan perlawanan terhadap imperialisme. Namun, sebagai gerakan perlawanan yang dilakukan oleh organisasi non-agama dan dianggap tidak relevan jika istilah tersebut digunakan untuk Ulama dan Santri dengan gerakan anti imperialistisnya. Ulama dan Santri dianggap sebagai tokoh pemutar tasbih semata di masjid, dan tidak pernah melancarkan perlawanan terhadap imperialis Barat, Apalagi setelah adanya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), pada 1927 di Bandung, terjadi kecenderungan dalam penulisan sejarah Indonesia, bahwa gerakan nasionalis dipelopori oleh PNI.

Pengertian ini jelas sebagai bentuk pendistorsian atau penyelewengan dalam penulisan sejarah. Hal ini dikarenakan akibat dari kesalahan penulisan sejarah Indonesia, yang banyak dituliskan bukan oleh ulama atau sejarawan muslim yang berpihak kepada kebenaran sejarah sebenarnya. Dengan kata lain, hal ini terjadi akibat adanya upaya deislamisasi penulisan sejarah Indonesia.

Sebenarnya, penggunaan istilah nasionalisme pada abad ke-20 M, dipelopori oleh Central Sjarikat Islam (CSI) dalam *National Congres Centraal Sjarikat Islam Pertama 1e Natico* yang berlangsung pada tanggal 17-24 Juni 1916 M, di Gedung Konferensi Asia Afrika, Bandung. Pada saat itu, Central Syarikat Islam (CSI) menuntut kemerdekaan bangsa Indonesia.⁷⁵

Dampak dari National Congres Centraal Sjarikat Islam Pertama 1e Natico di atas, terhadap organisasi masyarakat dan organisasi politik pada masa gerakan kebangkitan kesadaran nasional Indonesia, menjadikan Indische Party yang didirikan pada 1912 M, tiga tahun kemudian mengubah namanya menjadi National Indische Party (NIP), pada 1919 M. yang dipimpin oleh Dowwes Dekker Danoedirdjo Setaboedii di Bandung.

Sebelas tahun kemudian, lahirlah Persarikatan Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Bung Karno di Bandung (1927 M). Alasan Bung Karno menggunakan nama partainya nasional, yaitu pada tanggal 2 Mei 1951, Bung Karno menyatakan, "*Terutama sekali Tjokroaminoto guru saja, jang menanamkan pengaruh jang dalam pada djiwa saja jang dahaga*".

Ditinjau dari nama awal Perserikatan Nasional Indonesia, yang terinspirasi dari nama "Syarikat Islam" terbaca betapa kuatnya pengaruh Syarikat Islam di masyarakat Indonesia saat itu. Sehingga Soekarno dalam buku *Di bawah Bendera Revolusi*, menyatakan tentang keyakinan Ralston

⁷⁵*Ibid.*, h. 257.

Hayden bahwa pergerakan Syarikat Islam (SI) akan berpengaruh besar atas kejadian politik kelak di kemudian hari, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia Timur.

Terdapat ketidaksamaan pengertian antara nasionalisme di Eropa dan di Indonesia. Adapun Nasionalisme di Indonesia timbul sebagai reaksi terhadap imperialisme yang dikembangkan oleh Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol. Kemudian, diikuti oleh penjajah Kerajaan Protestan Belanda dan Inggris. Sedangkan pelopor gerakan perlawanan terhadap imperialisme Barat untuk Indonesia adalah Ulama dan Santri.

Oleh karena itu, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, mengutip pendapat Donald Eugene Smith dalam buku *Religion, Politics, and Social Change in the Third World (Agama, Politik, dan Perubahan Sosial di Dunia Ketiga)*, menyatakan bahwa ulama memegang peranan penting dalam memimpin perlawanan terhadap imperialis Barat dengan misi pengembangan agama Katolik dan Protestannya. Akibat imperialis Barat dengan identitas agama itu maka muncullah Islam di Nusantara Indonesia sebagai simbol perlawanan terhadap penjajah Barat.⁷⁶

Pendapat ini sejalan dengan pendapat W.F. Wertheim, yang menyatakan bahwa dampak dari agresi imperialisme Barat, menjadikan raja-raja Hindu dan Buddha masuk ke agama Islam dan menjadikan Islam sebagai gerakan politik (*political move*) dalam melawan desakan

⁷⁶*Ibid.*, h. 258.

Kristenisasi Barat (*Christian penetration*).⁷⁷

6) Sumpah Pemuda

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, pada saat pelaksanaan Kongres Pemuda II, yakni pada hari kedua Kongres, yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 1928 M, atau bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1347 H, melahirkan keputusan yang dinamakan dengan Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda di atas, oleh Mohammad Yamin, setelah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, disebutnya sebagai Sumpah Indonesia Raya karena 17 tahun kemudian pengaruhnya melahirkan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Mohammad Yamin dalam buku *Sumpah Indonesia Raya*, mencoba membentuk opini publik dengan menuturkan bahwa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berhasil terbentuk karena pengaruh agama Hindu-Buddha.

Tulisan Mohammad Yamin ini, jelas meniadakan pengaruh Islam yang mengadakan perlawanan heroik terhadap imperialis Barat, yakni Kerajaan Katolik Portugis yang melaksanakan keputusan Perjanjian Tordesilas (1494 M), yang dipimpin oleh Paus Alexander VI, dengan pendudukannya atas Malaka pada tahun 1511 M. Perlawanan terhadap Portugis kemudian disusul dengan perlawanan terhadap imperialis Protestan yang menduduki Jayakarta pada 1619 M.

⁷⁷W.F. Wertheim, *Effects of Western Civilization on Indonesia Society*, (Alfred A. Knopf: New York, 1950), h. 52.

Melalui tulisannya tersebut, Mohammad Yamin sengaja menciptakan deislamisasi penulisan sejarah Indonesia. Dia lupa bahwa bahasa Indonesia awalnya dari bahasa Melayu Pasar yang dituliskan dengan huruf Arab Melayu. Mohammad Yamin juga lupa Proklamasi 17 Agustus 1945 dituliskan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Sansekerta, seperti yang digunakan dalam Soempah Boekit Sigoentang dan Boekit Penonggoengan.⁷⁸

Menurut Ahmad Mansur, pada awal masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia pada abad ke-7 M atau abad ke- 1 H, bahasa Melayu juga disebut sebagai bahasa Melayu Pasar, yaitu bahasa yang digunakan oleh para wirausahawan di pasar. Bahasa ini dituliskan dengan huruf Arab Melayu atau disebut pula sebagai huruf Jawi. Di kalangan pesantren, bahasa ilmu menjadi bahasa ilmu. Sementara itu di kalangan pemegang kekuasaan politik Islam atau kesultanan, bahasa Melayu menjadi bahasa penghubung atau diplomatik antar sultan atau raja pada waktu itu, baik di wilayah regional maupun mancanegara. Kemudian, dengan adanya Kebangkitan Kesadaran Nasional dan diterbitkannya media cetak, bahasa Melayu juga menjadi bahasa jurnalistik.

Pengembangan dan perubahan bahasa Melayu itu, tidak lepas dari perjuangan ulama dalam mendakwahkan ajaran Islam di Nusantara karena ajaran Islam tidak dapat dilepaskan dari masalah fiqih, bagaimanapun juga bahasa Melayu merambah menjadi bahasa hukum Islam dalam aktivitas

⁷⁸Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 528-530.

dakwah ulama dan para wirausahawan.

Lebih lanjut, Ahmad Mansur Suryanegara mempertanyakan peran Jong Java sebagai organ pemuda Boedi Oetomo, yang putusan kongresnya pada April 1928 menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia, sulit dipercaya mereka ikut berperan dalam Kongres Pemoeda II, karena Boedi Oetomo, Organisasi induk Jong Java sendiri, lebih mengutamakan bahasa Jawa (Djawanisme). Selain itu, Jong Java juga menolak diskusi tentang politik. Apalagi, perwakilan dari Jong Java dalam Kongres Pemoeda II adalah dulunya seorang Mantri Polisi dari pemerintah kolonial Belanda.

Mungkinkah ia mampu memberikan sumbangan pikirnya untuk terwujudnya Sumpah Pemuda?⁷⁹

Lebih lanjut, Menurut Ahmad Mansu Suryanegara, Kongres Pemoeda II mengusulkan untuk membentuk wadah fusi segenap organisasi pemuda, yaitu Indonesia Muda. Usul P.P.P.I dan Jong Indonesia tersebut saat itu belum dapat diterima oleh semua peserta. Tiga tahun kemudian, Jong Java dalam Kongres di Solo pada 28 Desember 1930 - 2 Januari 1931, mulai menerima fusi dalam Indonesia Muda. Organisasi Budi Utomo berfusi dalam Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) pada 1931 M.

Selain itu, tidak hanya Jong Java yang menolak fusi Dalam 45 Tahun Sumpah Pemuda, dijelaskan bahwa Mohammad Yamin sebagai wakil Jong Soematanen Bond, menentang keras bentuk fusi dalam Indonesia Muda yang ditawarkan oleh P.P.P.I. dan Jong Indonesia, walaupun dalam ceramahnya ia berbicara tentang persamaan dan

⁷⁹*Ibid.*, h. 528-529.

kebangsaan Indonesia. Ternyata, kongres menemui kesukaran untuk melahirkan fusi, Indonesia Muda. Namun, selain berhasil melahirkan Soempah Pemoeda, Kongres Pemoeda II berhasil pula menciptakan kongres untuk menerima dua peranti kemerdekaan. Pertama, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional Indonesia,

7) Piagam Jakarta, Pancasila dan UUD 1945

Piagam Jakarta, pada 22 Juni 1945 M, atau bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1364 H, yang telah menjadi dasar *Gentlement Agreement* adalah merupakan produk kesepakatan para Ulama bersama segenap pemikir dan tokoh kemerdekaan pada waktu itu, termasuk diantaranya adalah Mr. M.A. Maramis perwakilan dari agama Kristen Protestan. Namun, akibat adanya distorsi dalam penulisan Sejarah Indonesia, Piagam Jakarta seperti dianggap murni produk pimpinan Islam saja, tanpa campur tangan Mr. M.A. Maramis dari Protestan.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Piagam Jakarta dikesankan identik dengan Negara Islam. Padahal secara historis, tujuh kata yang ada dalam Piagam Jakarta tersebut, yaitu “*dengan menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, disetujui 100 persen oleh Mr. M.A. Maramis perwakilan dai Kristen Protestan atau golongan Nasrani saat itu. Menyetujui dengan pengertian bahwa Syariat Islam hanya berlaku untuk umat Islam. dan tidak diwajibkan kepada non-muslim.

Dengan demikian, sebenarnya Piagam Jakarta, 22 juni 1945, Jumat Kliwon, 11 Rajab 1364 H, merupakan produk semua pihak, benar-benar sebagai *Gentlemen Agreement* menurut Soekiman Wirjosandjojo, kecuali PKI yang tidak ikut serta di dalamnya.

Menurut Anwar Harjono seperti yang dikutip oleh Ahmad Mansur Suryanegara, Piagam Jakarta kerap kali diindentikkan dengan ide Negara Islam. Padahal sepanjang sejarahnya, belum pernah ada satu partai Islam pun yang mencantumkan tujuannya untuk membentuk Negara Islam.⁸⁰

Selanjutnya dijelaskan, apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, sebenarnya tidak lain merupakan perumusan Pancasila yang pertama kali oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dalam sejarah persiapan pembentukan Republik Indonesia.

Pada waktu itu, perumusan tersebut diakui oleh Soekiman Wirjosandjojo sebagai *Gentlemen Agreement* antara pemimpin-pemimpin nasionalis Islam dengan pemimpin nasionalis netral agama lainnya. Adapun dihapuskannya tujuh kata pada Piagam Djakarta, terjadi di luar konsensus Panitia Sembilan. Hanya sebagai pelaksanaan pesan dari Laksamana Maeda, jadi karena faktor luar.⁸¹

Sayangnya, proses sejarah itu, tidak dituliskan dalam Sejarah Indonesia secara terbuka. Bahkan, sebaliknya terjadi peniadaan peran Ulama dalam proses melahirkan Indonesia memiliki Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

⁸⁰*Ibid.*, h. 169.

⁸¹*Ibid.*, h. 169.

Dengan kata lain, sebagian penulis menyatakan bahwa Ulama tidak memiliki peran sama sekali dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Padahal, realitas sejarahnya tanpa persetujuan para Ulama, mungkinkah terjadi perumusan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 seperti yang dimiliki bangsa Indonesia hingga sekarang.

Ideologi Pancasila serta konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, secara politis disetujui oleh para Ulama dan telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Perumusan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, tidak bisa dipisahkan dari peran para Ulama seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan Mr. Kasman Singodimedjo perwakilan dari Persyarikatan Muhammadiyah, Wachid Hasjim dari Nahdlatul Ulama (NU), bersama Mr. Teuku Mohammad Hasan dari perwakilan Ulama Aceh.

Hasil perumusan ini kemudian diserahkan kepada Mohammad Hatta untuk disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945, Sabtu Pahing, atau bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1364 H.

Mungkinkah tanpa persetujuan Ulama, antara lain Wachid Hasjim-Nahdlatul Ulama, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Mr. Kasman Singodimedjo dari Persyarikatan Muhammadiyah, dan Teoekoe Mohammad Hasan dari perwakilan umat Islam Sumatra, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mampu mengesahkan ideologi Pancasila, konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden serta penentuan batas wilayah dan penetapan delapan Provinsi negara Republik Indonesia dalam

waktu persidangan yang relatif sangat pendek?⁸²

Untuk mengembalikan kesadaran tentang sejarah ini, Presiden Soekarno dan pemerintah pada tanggal 25 April 1959, menganjurkan pimpinan dan anggota Konstituante agar memutuskan untuk kembali ke ideologi Pantjasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.⁸³

3. Pasca Kemerdekaan

a. Hari Kebangkitan Nasional

Dalam upaya membangkitkan kesadaran nasional. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kabinet Hatta, menempuh berbagai cara untuk menyatukan berbagai konflik kepentingan dan ideologi antar partai politik serta militer pada waktu itu. Salah satu cara yang dipilih adalah dengan pendekatan kesadaran tentang sejarah, yakni dengan mengadakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Berdasarkan saran dari Ki Hadjar Dewantara dan Radjiman Wedjodiningrat, akhirnya dipililah tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei sendiri merupakan hari jadi organisasi Boedi Oetomo.

Sebenarnya sukar dimengerti, sangat bertentangan dengan fakta sejarahnya, tetapi Kabinet Hatta melalui kekuasaan pemerintah tetap memutuskan dan menetapkan 20 Mei sebagai kebangkitan kesadaran nasional.⁸⁴

⁸²Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 172.

⁸³*Ibid.*, h. 387.

⁸⁴*Ibid.*, h. 244.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Organisasi Boedi Oetomo ini sebenarnya telah dibubarkan oleh pendirinya sendiri, Dr. Soetomo. Dan para tokohnya, seperti Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, Dr. Tjipto Mangoenkosoemo, sebenarnya telah keluar dari Organisasi ini, karena dinilainya sebagai gerakan eksklusif dari Regent atau Boepati dan bangsawan Djawa atau Prijaji, yang menentang gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional.

Walaupun Boedi Oetomo sebagai organisasi beranggotakan kalangan Prijaji dan Boepati sebagai perangkat pelaksana sistem penjajahan dan pemerintahan kolonial Belanda yang dikenal dengan sistem tidak langsung - *indirect rule system*. Dengan kata lain, Prijaji atau Boepati sebagai kaum loyalis terhadap penjajahan dengan pemerintahan kolonialnya. Dapat dibuktikan Kongres Boedi Oetomo Ke-20 di Surakarta, 1928, menolak pelaksanaan Tjita2 persatoean Indonesia sebagai reaksi hasil keputusan Jong Islmieten Bond Congres.⁸⁵

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, banyak arsip negara dari suatu peristiwa sejarah, baru boleh dibuka untuk umum bila telah berusia minimal tiga puluh tahun. Pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru, peran Ulama dan Santri dalam perjuangan merebut kembali kemerdekaan bangsa Indonesia, serta perjuangannya dalam menegakkan kembali ajaran Islam yang dirusak oleh penjajah Barat, kurang diperlihatkan secara jelas. Padahal, setiap perjuangan membela tanah air dan bangsa, serta agama, Ulama dan Santri tidak pernah absen. Termasuk, perlawanan terhadap Komunisme.

⁸⁵*Ibid.*, h. 243.

Ditiadakannya peran Ulama dan Santri dalam penulisan sejarah, maka terasa aneh jika Ulama dan Santri dinyatakan sebagai pelopor dalam perjuangan nasional, karena telah berkembang pengertian nasionalisme hanya disandang oleh tokoh atau organisasi yang tidak memperjuangkan agama. Walaupun istilah nasionalisme sendiri awalnya dipelopori dan disosialisasikan penggunaannya oleh National Congress Central Sjarikat Islam (CSI) Pertama di Natico, pada tanggal 17 - 24 Juni 1916 di Bandung.

Dampaknya sukar untuk memahami bila terdapat tulisan sejarah Indonesia yang menyatakan adanya salah seorang Wali Songo ikut mengusir imperialis Barat dari Nusantara Indonesia. Tidak mengerti bila terdapat tulisan sejarah Indonesia menuturkan Soenan Goenoeng Dati atau Sjarif Hidajatoellah melancarkan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Kerajaan Katolik Portugis di Soenda Kalapa, 22 Juni 1527 M atau 22 Ramadhan 933 H. Soenan Giri melancarkan perlawanan bersenjata terhadap penjajah Kerajaan Protestan Belanda atau Veregde Oost Indische Compame VOC) di Surabaya. Lebih sukar lagi jika terdapat tulisan yang menyatakan adanya Santri insurrection (Perlawanan Santri) terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam menjawab tantangan imperialisme Barat dan Timur, yang dipimpin oleh Ulama dan Santri dalam menanamkan kesadaran berbangsa, serta mempertahankan kemerdekaan, adalah pengertian nasionalisme yang sebenarnya. Akan tetapi, pengertian nasionalisme didistorsikan maknanya dan dianggap sebagai gerakan bukan Islam. Upaya ini oleh Ahmad Mansur Suryanegara dinilai sebagai bagian dari upaya deislamisasi nasionalisme di Indonesia.

Ulama dan Santri dinilai tidak memiliki konsep perlawanan terhadap penjajah Barat ataupun Timur. Ulama dan Santri dianggap hanya sebagai pendidik agama Islam dengan masjid dan pesantren sebagai tempat aktifitasnya. Dan dianggap bahwa kehadiran Ulama dan Santri dengan ajaran Islamnya tidak pernah menciptakan perubahan ekonomi, sosial, budaya, politik.⁸⁶

b. Pendidikan Islam

1) Madrasah

Pengaruh sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh kekuasaan politik Islam seperti *Dinasti Umayyah*, *Abbasiyah*, dan *Fatimiyah*, di Indonesia melahirkan sistem pendidikan yang dikenal dengan nama pesantren atau madrasah. Pada saat itu, nama universitas ataupun akademi tidak digunakan karena kebijakan pemerintahan Islam seluruh aktivitas apa pun digunakan istilah dari bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk pendidikan menggunakan istilah madrasah, misalnya *Madrasah Nizhamiyah*, *Madrasah AlAzhar*, dan *Madrasah Qurtubah*. Hingga akhirnya dunia Barat atau Eropa memiliki pendidikan sendiri dengan meniru sistem pendidikan Islam, dan hanya diubah istilahnya dengan menggunakan bahasa Latin. Namun, sistem kurikulum dan sistem ujiannya, serta upacara wisuda masih digunakan hingga sekarang.

Misalnya pemakaian toga pada upacara Wisuda. Toga berasal bahasa latin, pengganti istilah Jubah. Warna hitam sebenarnya sebagai warna kiswah Ka'bah. Secara internasional tudung kepala toga, masih tetap berbentuk segi empat lambang bentuk Ka'bah -

⁸⁶Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 128.

segi empat. Kecuali di Indonesia berubah menjadi segi lima.⁸⁷

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, penggunaan istilah madrasah dalam dunia pendidikan saat ini mengalami pergeseran makna. Istilah madrasah sekarang di Indonesia digunakan untuk studi agama pada tingkat dasar, menengah dan ke atas (MI/MTs/MA). Padahal pada masa kejayaan kekuasaan politik Islam dulu istilah madrasah ini digunakan untuk perguruan tinggi Islam atau universitas.

Perlu diperhatikan di sini, perubahan istilah madrasah pada masa kejayaan Umayyah, Abbasiyah, dan Fathimiyah makna madrasah identik dengan universitas. Namun, di Indonesia sekarang istilah madrasah justru digunakan untuk studi agama teratas pada tingkat menengah atas. Misalnya, Madrasah Aliyah Negeri. Sedang studi agama yang lebih tinggi dengan menggunakan istilah Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, atau Universitas Islam Negeri.⁸⁸

2) Pesantren

Dalam sejarah Indonesia kata Ahmad Mansur Suryanegara, karena dituliskan atas dasar pandangan Hindu Sentrisme, maka pesantren pun dituliskan meniru dari Hindu. Dengan bertolak pada pandangan yang demikian, Islam dinilai tidak punya konsep dalam sistem pendidikannya.

Di Indonesia, sekolah pesantren tidak dituliskan sebagai pengaruh dari sistem pendidikan Islam di Timur Tengah. Namun, dituliskan oleh sejarawan Belanda dari pengaruh Hindu. Walaupun realitasnya di masyarakat Hindu Bali sampai kini tidak mengenal sistem pendidikan Pasantren. Dengan kata lain sampai kini, di masyarakat Hindu Bali tidak pernah ada Pesantren Hindu Bali dan tidak pula pernah ada pesantren kilat seperti yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam bulan Ramadhan. Jika pesantren benar-benar berasal dari ajaran Hindu, apakah mungkin Persatuan Islam mendirikan Pesantren Persatuan Islam.⁸⁹

⁸⁷*Ibid.*, h. 68-70.

⁸⁸*Ibid.*, h. 68-70.

⁸⁹*Ibid.*, h. 68-70.

Fungsi pesantren tidak hanya sebagai wadah melahirkan para ulama. Namun, pesantren juga sebagai tempat pengkaderan calon pimpinan bangsa. Umumnya, putra-putra Sultan seperti Kesultnan Ternate, Tidore dan Maluku, mereka kebanyakan dipesantrenkan oleh orang tuanya kepada Sunan Giri di Gresik dan Sunan Ampel di Surabaya.

Pesantren sebagai tempat pembinaan calon pemimpin bangsa yang mempunyai kemampuan sebagai pembangkit kesadaran kemerdekaan dari penjajah dan cinta tanah air, bangsa, dan agama. Dalam sejarah Indonesia kesadaran ini disebut sebagai Kesadaran Nasional. Menurut Sartono Kartodirdjo, adanya Pesantren dengan latar belakang santri yang datang dari berbagai suku, etnis dan budaya, dan mengabaikan pandangan yang kesukuan, memposisikan ajaran Islam sebagai dasar wawasan tentang nasionalisme di Indonesia.⁹⁰

Musuh utama umat Islam Indonesia dalam hal politik adalah bangsa penjajah Barat yang berusaha mengembangkan ajaran agama Katolik dan Protestan melalui imperialisme. Sejarah telah menulis, bahwa setiap gerakan perlawanan terhadap imperialisme dianggap sebagai gerakan nasionalisme. Penggunaan istilah nasionalisme tersebut merupakan gambaran dari jawaban bangsa yang terjajah terhadap imperialisme yang berusaha merebut dan menguasai tanah air, menindas

⁹⁰Sartono Kartodirdjo, *Protest Movement in Rurel Java A Study of Agrarian Unrest in The Nineteth and Early Twenteth Centuries*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978). h. 57.

dan merendahkan harga diri bangsa yang terjajah, serta memaksakan agamanya agar bangsa yang terjajah melakukan konversi agama secara paksa. Pindah dari penganut Islam menjadi penganut Katolik atau Protestan.⁹¹

Pemerintah kolonial Belanda melakukan upaya tak manusiawi dalam menjajah bangsa pribumi, yakni mematahkan gerakan pendidikan yang berupaya mencerdaskan bangsa Indonesia yang dilakukan oleh para Ulama. Menurut Bousquet, suatu realitas yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, bahwa Belanda berkeinginan dan masih tetap menghendaki menegakkan superioritas kekuasaan atas dasar kebodohan pribumi. Dan berbagai kebijakan politik penjajah, dapat dibaca melalui upaya mengondisikan pribumi sebagai bangsa terjajah tetap bodoh. Dengan target hilangnya kesadaran sebagai bangsa yang miskin dan bodoh serta terjajah menjadi merasa tidak perlu melakukan perlawanan terhadap penjajah karena kebodohnya menjadikan penderitanya, tidak menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohnya sebagai produk strategi penjajah.

Pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan fasilitas pendidikan untuk kalangan anak bangsawan dan anak raja serta anak Eropa. Tidak lupa diberikan fasilitas secara diskriminatif untuk Cina dan Ambon. Pesantren dijadikan target serangannya, tuthless operation (operasi yang tidak kenal belas kasih) Kiai atau Ulamaanya digantung. Bangunan dan sarana pendidikan lainnya dibakar atau dirusakkan. Santri-

⁹¹Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 140.

sanstrinnya ditangkap dan dibuang jauh dari wilayah asalnya.

Latar belakang sejarah ini menjadikan pesantren berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam. Menjadi sentra pembangkit kesadaran nasional dan Ulama sebagai pemimpinnya, mengajarkan kepada santri dan masyarakat pendukungnya tentang perlunya memertahankan tanah air, menyelamatkan bangsa, dan merebut kembali kemerdekaan. Terutama berjuang menegakkan agama dan hukum Islam di seluruh Nusantara Indonesia agar terbebas dari penindasan Kristenisasi dan imperialisme Katolik atau imperialisme Protestan yang akan menggantikan hukum Islam dengan hukum Barat.

3) Perguruan Tinggi (Universitas)

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, pengaruh pemikiran Hindu Sentrisme dan Buddha Sentrisme merupakan bagian dari upaya deislamisasi sejarah Indonesia yang berlanjut sampai masa sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945. Kita dapat melihat kebijakan pemerintah dalam pemberian nama-nama Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yakni dengan nama tokoh-tokoh Hindu-Buddha.

Misalnya, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Mulawarman. Dibenarkan pula menggunakan nama kerajaan atau kekuasaan politik Hindu atau Buddha: Universitas Padjadjaran, Universitas Sriwijaya, Universitas Tadjungpura.⁹²

⁹²Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 297.

Sementara itu, untuk perguruan tinggi yang dikelola oleh Departemen Agama hanya dibenarkan menggunakan nama-nama tokoh Islam saja. Namun, tidak dibenarkan menggunakan nama-nama kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang ada di Indonesia.

Adapun perguruan tinggi yang dikelola oleh Departemen Agama hanya dibenarkan menggunakan nama tokoh-tokoh Islam: IAIN Sjarif Hidajatullah, IAIN Sunan Kalijaga, IAIN Wali Sanga, IAIN, Sunan Ampel, IAIN Antasari dan lain-lain. Tidak dibenarkan menggunakan nama-nama kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Misalnya, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Demak, Kesultanan Palembang. Mengapa demikian? Diizinkan penggunaannya nama-nama kerajaan atau kekuasaan politik Hindu Buddha, diperkirakan tidak akan melahirkan kebangkitan kekuasaan politik Hindu dan Buddha karena penganutnya hanya 2,5 persen. Benarkah? Wallahu 'alam.⁹³

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dipahami bahwa, dampak yang ditimbulkan akibat deislamisasi dalam penulisan sejarah Indonesia, tidak hanya mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia setelahnya, namun juga berdampak pada kebijakan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia, khususnya Pendidikan Islam.

⁹³*Ibid.*, h. 297.

B. Analisis

1. Deislamisasi Sejarah Indonesia

a. Pra Kemerdekaan

1) Islam Masuk Ke Indonesia

Berdasarkan gambaran pada pembahasan sebelumnya tentang masuknya Islam di Indonesia, terdapat problem dalam penulisan sejarah Indonesia, yakni terbaca adanya upaya Deislamisasi yang dilakukan oleh sejarawan Barat dalam melakukan penulisan sejarah Indonesia, khususnya tentang sejarah Islam. Yakni, dari segi waktu masuknya agama Islam, yang seharusnya menurut Buya Hamka adalah pada abad pertama Hijriah atau Abad ke-7 M. dimundurkan waktunya menjadi abad ke-13 M, yaitu ketika perkembangan Islam telah meluas ke pelosok-pelosok Nusantara, dan setelah berdirinya kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Samudra Pasai.

Sejarawan Barat pada masa pemerintah kolonial Belanda sengaja membuat periodisasi sejarah Indonesia dan memundurkan waktu masuknya agama Islam berada jauh mundur ke belakang atau sesudah keruntuhan kekuasaan politik Hindu-Buddha. Dengan berdasarkan periodisasi sejarah tersebut, menjadikan Islam baru dibicarakan setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1478 M. Selain itu, tidak dijelaskan pula bahwa sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M, ajaran agama Islam sudah mulai

didakwahkan oleh para pedagang muslim di Asia Tenggara.

Selain itu, upaya Deislamisasi dalam penulisan sejarah Islam Indonesia. Yakni, sejarawan Barat menuliskan bahwa Sejarah Islam Indonesia adalah sebagai Sejarah Lokal. Dan bukan sebagai sejarah Internasional. Anggapan mereka ini tanpa dasar yang kuat dan terkesan mengabaikan tentang fakta sejarah bangsa Indonesia, yang sejak lama telah menjalin hubungan dengan negara-negara luar.

Selain itu, menurut Ahmad Mansur Suryanegaa, informasi sejarah tentang aktivitas pasar di Arabia kurang dipahami oleh sebagian sejarawan. Hal ini akibat sistem penulisan sejarah yang masih meniru cara pandang sejarawan Barat, yang umumnya mengesampingkan peranan pasar Arabia. Sebaliknya, mereka lebih mengangkat penulisan sejarah tentang peranan pasar di Cina dan India. Padahal menurut D.H. Burger dan Mr. Prajudi, dalam buku *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, sudah pernah terjalin jalur hubungan niaga sejak 500 Sebelum Masehi (SM), melalui jalan darat yang dikenal dengan istilah jalur sutera. Sedangkan jalur perniagaan laut antara India, Cina dan Nusantara Indonesia telah terjalin sejak abad pertama Sebelum Masehi (SM).⁹⁴

⁹⁴D.H. Burger dan Mr. Prajudi, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Djilid I, (P.N. Pranja Paramita: Jakarta, 1960), h. 15-16.

Adapun mengenai waktu kapan masuknya agama Islam ke Indonesia dan berasal darimana, terdapat beberapa teori mengenai hal tersebut, yakni:

a) Teori Gujarat

Teori pertama yang membahas tentang masuknya agama Islam di Indonesia adalah Teori Gujarat, yang dipopulerkan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-13 M, yang dibawa oleh para pedagang dan Ulama dari Gujarat, India.

Sebenarnya, penggagas pertama Teori Gujarat ini adalah Pijnapel salah seorang Sejarawan dari Universitas Leiden, Belanda. Kemudian Teori Gujarat ini dikembangkan dan disebarluaskan oleh Snouck Hurgronje, yang juga berasal dari negara Belanda.⁹⁵

Adapun dasar argumentasi yang mendukung Teori Gujarat ini adalah didasarkan pada peranan para pedagang asal Gujarat, yang telah membuat jalur perdagangan dengan masyarakat sebelum para pedagang dari Timur Tengah atau Arab melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Menurut Snouck Hurgronje, wilayah Kesultanan Samudra Pasai di Aceh adalah yang menjadi wilayah pertama kali dimasuki para pedagang muslim asal Gujarat tersebut.

⁹⁵G.W.J Drewes, *New Light on the Coming of Islam to Indonesia*, 1968, dalam BKI: https://brill.com/downloadpdf/journals/bki/124/4/article-p433_1.pdf

Berdasarkan tulisan-tulisan Snouck Hurgronje inilah, banyak sejarawan Barat yang akhirnya mengikuti Teori Gujarat ini, sehingga buku-buku yang mereka tulis hampir sepakat bahwa, awal masuknya Islam di Indonesia terjadi pada Abad ke-13 M, yang disebarkan para pedagang asal Gujarat, India.

Teori Gujarat ini oleh sebagian kalangan dianggap lemah, dikarenakan seperti yang diakui oleh Snouck Hurgronje sendiri, pada abad ke-13 Masehi, di Indonesia sudah berdiri suatu kekuatan politik Islam (kesultanan), yakni Kerajaan Samudra Pasai. Maka, dapat dipastikan Islam masuk di Indonesia jauh sebelum kedatangan orang-orang Gujarat tersebut. Snouck Hurgronje juga tidak menjelaskan antara masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Apakah mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung mendirikan kekuasaan politik atau kesultanan tanpa melalui proses Islamisasi terlebih dahulu. Hal inilah yang tidak disadari oleh para sejarawan Barat. Sehingga mereka mengamini apa yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje tentang Teori Gujarat ini, tanpa melakukan kritik dan kajian terlebih dahulu.

b) Teori Makkah

Teori selanjutnya yang membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah Teori Makkah, yang dikembangkan oleh Buya Hamka. Dia berkesimpulan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, dengan

menggunakan fakta yang diangkat dari berita Cina pada masa *Dinasti Tang* (618-905 M), yang menuturkan bahwa mereka menemukan daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatra. Yaitu, adanya perkampungan Islam di Barus, Sumatera pada tahun 674 M. Sesuai namanya, daerah ini merupakan penghasil utama Kapur Barus. Umumnya masyarakat Timur Tengah sangat menyukai produk ini. Sehingga menarik perhatian pedagang dari Arab untuk datang ke Indonesia.

Bukti lain, yang dijadikan landasan Teori Makkah ini adalah ditemukannya sebuah makam (kuburan) umat Islam tertua di Indonesia bernama Siti Fatimah binti Maimun. Yaitu, sebuah makam yang terletak di Gresik, Jawa Tengah. Pada makam tersebut ditulis dengan ukiran kaligrafi arabic bergaya *kufi*. Selain itu, terdapat pula pemakaman Islam di Trowulan, yang merupakan wilayah Majapahit pada waktu itu. Oleh karena itulah diyakini bahwa pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit sudah banyak orang yang memeluk agama Islam.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka disimpulkan Islam masuk di Indonesia pertama kali pada Abad ke-7 M, yang dibawa dari daerah asalnya (Makkah) oleh pedagang dari Timur Tengah.

c) Teori Persia

Teori berikutnya adalah Teori Persia yang dikembangkan oleh P.A Hoesein Djajadiningrat, yang menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia dibawa dari Persia pada abad ke-11 M, dan bermazhab Syi'ah. Pendapatnya ini didasarkan pada persamaan budaya di kalangan masyarakat Islam Indonesia dan masyarakat Islam di Persia.

Menurut penulis, landasan argumentasi yang mendukung Teori Persia ini sangat lemah, karena faktanya mayoritas pemeluk agama Islam di Indonesia adalah penganut mazhab Syafi'i dan berfaham *Ahlush Shunnah wal jama'ah (Aswaja)*, dan bukan Syi'ah seperti yang dikemukakan oleh Abubakar Atjeh dan Hoesein Djajadiningrat. Memang ada sebagian daerah di Indonesia yang beraliran Syi'ah, namun, tidak sebanyak *Ahlush Shunnah wal jama'ah*.

d) Teori Cina

Teori berikutnya yang membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah Teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet Muljana. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perantara masyarakat muslim Cina yang migrasi ke Palembang pada abad ke- 9 M, yang menjadi awal masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat ini juga bertolak dari Kronik *Klenteng Sam Po Kong*. Slamet Muljana tidak hanya menyatakan

bahwa Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Akan tetapi, dia juga berkeyakinan bahwa para Wali Songo juga merupakan keturunan Cina.

Islam masuk di Cina sendiri dibawa oleh panglima Islam pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, yang bernama Saad bin Waqash. Penyebaran agama Islam di Cina sangat pesat, bahkan, salah satu kota besar di Cina pada masa itu yakni kota Kanton (sekaang Ghuangzhou), pernah menjadi pusat dakwah Islam di Cina.

Menurut Jean A. Berlie (2004) dalam bukunya *Islam in Cina*, menyatakan bahwa pada tahun 713 M, terjadi hubungan antara bangsa Arab dengan masyarakat Cina. Selain itu, diyakini masuknya agama Islam di nusantara bersamaan dengan banyaknya migrasi masyarakat Cina muslim ke nusantara pada tahun 879 M atau abad ke-9 M, yang kebanyakan memasuki wilayah bagian Selatan Sumatera.

e) **Teori Maritim**

Teori berikutnya yang membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia adalah Teori Maritim yang dikembangkan oleh sejarawan asal Pakistan, N.A. Baloch.⁹⁶ Teori ini menjelaskan bahwa awal masuknya agama Islam di Indonesia adalah terjadi pada abad ke-7 M, atau abad pertama Hijriah, yang dikenalkan

⁹⁶Lihat dalam buku *The Advent of Islam in Indonesia*, (Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research. 1980).

oleh para pedagang Arab dari Timur Tengah. Adapun rentang waktu yang dilalui dalam proses penyebaran agama Islam ini berlangsung kurang lebih selama lima abad, yakni, sejak abad pertama hingga abad kelima Hijriah.

Teori ini mirip dengan Teori Makkah yang juga menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Hijriah, Jika Teori Makkah yang dikembangkan Buya Hamka, argumentasinya berdasarkan pada berita Cina pada masa *Dinasti Tang*, yang menemukan daerah hunian wirausahawan Arab Islam di pantai barat Sumatra. Maka Teori Maritim berdasarkan pada aktifitas wirausahawan (pedagang) asal Arab yang memiliki navigator atau mualim untuk berlayar mengelilingi Samudara. Sehingga mereka sampai di Nusantara dan menguasai pasar-pasar. Melalui aktivitas pasar, ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut niaga di pantai-pantai tempat persinggahannya pada masa abad ke-1 H atau abad ke-7 M.

Berdasarkan uraian di atas, dari kelima Teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia, yakni Teori Gujarat, Teori Makkah, Teori Persia, Teori Cina dan Teori Maritim, menurut penulis, Teori yang paling relevan dan mempunyai dasar argumentasi yang kuat adalah Teori Makkah, yang didukung juga oleh argumentasi Teori Maritim. Yaitu, Islam masuk di Indonesia

pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M, yang dibawa oleh para pedagang Arab melalui jalur pasar. Kemudian, barulah pada aabad ke-13 M, terjadi pengembangan Islam hingga ke pedalaman. Pada periode ini pengembangan agama Islam ke pedalaman dilakukan oleh para wirausahawan pribumi. Selain itu, kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Indonesia mulai tumbuh, yakni dimulai dengan Kesultanan Aceh pada abad ke-9 M. Kemudian, susul oleh wilayah-wilayah lainnya di Indonesia hingga abad ke-13 M, yang ditandai dengan berdirinya Kesultanan Samudra Pasai.

Sebenarnya, dari kelima Teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia tersebut, yakni Teori Gujarat, Teori Makah, Teori Persia, Teori Cina dan Teori Maritim, semuanya benar dan saling berhubungan satu sama lain. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan di sini adalah cara kita dalam menyingkapi dan menempatkan masing-masing Teori sesuai dengan perodesasinya. Dengan kata lain, Teori Makkah adalah yang paling relevan dibandingkan Teori lainnya, jika kita berbicara tentang awal pertama kali Islam datang di Indonesia, yang dikuatkan dengan Teori Maritim dengan penguasaan pasarnya.

Kemudian, ketika kita berbicara tentang perkembangan Agama Islam di Indonesia, maka Teori Cina, Teori Gujarat dan Teori Persia adalah yang paling relevan untuk menjelaskannya, yang dibuktikan dengan argumentasi pendukung masing-masing

Teori. Oleh karenanya, penulis berkesimpulan bahwa Teori tentang masuknya Islam di Indonesia ini memiliki hubungan satu sama lain.

2) Perkembangan Islam di Indonesia

Proses penyebaran agama Islam di Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad yang lalu dan proses tersebut terus berlanjut hingga sekarang. Sehingga Islam menjadi agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia, dan menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh di kawasan regional dan Internasional.

Banyak ahli mencoba menjelaskan mengapa Islam dapat diterima sebagai agama mayoritas masyarakat di Indonesia dengan mengemukakan beberapa teori. Sebagian menyatakan bahwa para pedagang Muslim yang melakukan aktivitas perdagangannya di Asia Tenggara dengan memperkenalkan Islam untuk mendapatkan posisi yang kuat secara ekonomis maupun politis di kalangan masyarakat setempat. Segi ekonomis ditempuh dengan memperkenalkan ketentuan-ketentuan dalam Islam tentang perdagangan sehingga mendapatkan keuntungan ekonomi secara maksimal. Cara yang dilakukan para pedagang ini secara tidak langsung membatasi pilihan masyarakat terhadap agama lain. Teori ini juga mengatakan bahwa kolonialisme Portugis, Inggris dan Belanda lebih mengutamakan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dibanding untuk mengkristenkan penduduk pribumi. Hal

ini mengandung pengertian bahwa keberadaan Islam dan penyebarannya tidak bertentangan dengan kebijaksanaan resmi penguasa kolonial sebagaimana kolonial juga tidak memaksakan agama Kristen kepada penduduk pribumi.⁹⁷

Secara umum Islam di Asia Tenggara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam di kawasan yang lain terutama Timur Tengah yaitu damai, ramah, dan toleran. Penyebaran Islam di kawasan ini bukan melalui ekspansi pembebasan yang hampir selalu melibatkan kekuatan perang. Konsekuensinya, Islam yang ada adalah Islam yang lunak atau akomodarif, tentunya termasuk dalam kepercayaan, praktek keagamaan, dan tradisi setempat yang akhirnya terbawa sampai pada penerimaan masalah ideologi negara. Pendapat lainnya, menyatakan bahwa kolonialisme justru merupakan faktor pendorong terjadinya proses islamisasi secara lebih intensif di kawasan Asia Tenggara. Kebijakan koloni yang membedakan dan memecah belah sosial dan kultural masyarakat pribumi menjadikan Islam sebagai satu wadah integrasi untuk mempertahankan diri menghadapi penindasan penjajah.

Teori tentang penyebaran Islam yang dapat diterima oleh sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia adalah fleksibelnya ajaran Islam yang dikenalkan ke Indonesia “disesuaikan” dengan

⁹⁷Dudung Abdurrahman, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007).
h. 318.

sifat mistik dan sinkretik kepercayaan masyarakat sebelumnya. Menurut teori ini, Islam tasawuf nyaris mudah dapat diterima. Dalam tahap pertama mungkin memang demikian halnya, akan tetapi dalam proses dan tahap perkembangan selanjutnya "kesamaan" yang memudahkan masyarakat Indonesia mengubah agamanya secara besar-besaran memeluk agama Islam, menjadi proses penghilangan kesamaan itu ke arah Islam yang diyakini lebih murni.⁹⁸

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tentang awal masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Yaitu, masuknya agama Islam di Indonesia awalnya melalui gerbang pasar, yang disebarluaskan oleh para wirausahawan muslim dari Timur Tengah, yang merangkap sebagai juru dakwah.

Menurut D.H. Burger, Islam di Indonesia dikembangkan dengan jalan damai dan tidak disertai dengan penaklukan wilayah atau invasi militer.⁹⁹ Namun, dalam penulisan sejarah Indonesia, yang ditulis oleh Sejarawan Barat, dikatakan bahwa, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara-cara kekerasan, yakni penyebaran agama Islam melalui penaklukan-penaklukan dan penguasaan wilayah oleh kesultanan Islam terhadap Kerajaan Hindu-Buddha.

⁹⁸*Ibid.*, h. 318.

⁹⁹D.H. Burger dan Mr. Prajudi, *Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Djilid I, (P.N. Pranja Paramita: Jakarta, 1960), h. 43.

Tuduhan negatif yang dialamatkan kepada Umat Islam tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk membentuk citra negatif kepada generasi muda bangsa Indonesia terhadap agama Islam. Cerita tentang Keruntuhan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Pajajaran misalnya, digunakan oleh para Orientalis Barat untuk memperkuat teori dan analisis sejarah versi mereka, bahwa agama Islam di Indonesia dikembangkan dengan pedang. Yakni, menurut mereka Islam disebarkan melalui pemaksaan dan penindasan. Padahal, realitas sejarah yang sebenarnya tidak demikian. Islam di Indonesia tidak mengenal adanya pemaksaan agama kepada masyarakat pribumi. Para wirausahawan muslim datang ke Indonesia bukan sebagai penakluk, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Spanyol pada abad ke-16 M, yang membunuh dan mengusir kaum muslimin yang tidak mau pindah dari agama Islam.¹⁰⁰ Tujuan wirausahawan muslim datang ke Indonesia adalah murni untuk berdagang dan berburu rempah-rempah. Dari hasil penjualannya tersebut mereka gunakan sebagai bekal untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan sebagiannya lagi mereka gunakan untuk modal dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam melalui aktifitas di Pasar.

¹⁰⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Meluruskan Sejarah Islam*, h. 246-247.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa gerakan Deislamisasi yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam salah satunya adalah dalam bentuk distorsi penulisan sejarah. Menurut Yusuf Qardhawi banyak Orientalis Barat ketika mengkaji sejarah Islam, selalu menggunakan pola pikir yang mendiskreditkan Islam.¹⁰¹ Tujuan mereka mempelajari Islam tidak lain adalah untuk mencari kelemahannya dan tahap selanjutnya melakukan upaya Deislamisasi.

Sementara itu, dampak distorsi dalam penulisan sejarah berpengaruh pada pola pikir masyarakat setelahnya, ketika informasi dan sejarah yang diterima telah mengalami penyimpangan dan pembelokan, perlahan-perlahan hal itu akan menjauhkannya dari agama sebagaimana yang terjadi pada sebagian kalangan umat Islam.

3) Imperialis Barat Masuk Ke Indonesia

Kedatangan imperialis Barat di Indonesia, yaitu pada abad ke-16 M, yang diawali dengan kedatangan Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol. Kemudian disusul oleh imperialis Kerajaan Protestan Belanda dan Inggris Pada abad ke-17 M.

¹⁰¹*Ibid*, h. 269.

Tantangan penjajahan Barat tersebut, dijawab oleh Ulama dan Santri dengan masyarakat pesantrennya, para sultan dengan pengaruh kekuasaan politiknya, bersama-sama melancarkan perlawanan bersenjata terhadap imperialis Barat, baik di darat maupun di laut.

Adapun kekuasaan politik Islam atau kesultanan pada abad ke-16 M, yang melancarkan perlawanan bersenjata terhadap Imperialis Barat, antara lain adalah: Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten dan Jayakarta, Kesultanan Aceh, Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ambon, Kasultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Goa dan Kesultanan Brunei, terhadap Kerajaan Kerajaan Katolik Portugis dan Spanyol. Kemudian, pada abad ke-17 M. perlawanan bersenjata terhadap imperialis Barat, dilanjutkan oleh Kesultanan Mataram dan Tatar Ukoet, Kesultanan Banten, Kesultanan Goa Makasar dan Kesultanan Aceh, terhadap Kerajaan Protestan Belanda dan Kerajaan Protestan Anglikan Inggris.¹⁰²

Berdasarkan gambaran tersebut, peran Ulama dan Santri, yang didukung oleh para Sultan dalam membendung kekuatan Imperialis Barat merupakan bukti otentik sejarah pergerakan Ulama dan umat Islam dalam membela bangsa dan negara dari kaum penjajah. Namun, dalam sejarah Indonesia yang ditulis oleh

¹⁰²Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 141-142.

para sejarawan, jarang sekali diungkap tentang peran Ulama dan Santri tersebut. Jika pun ada, dimaknai dengan pengertian yang lain. Akibatnya, Ulama dan Santri dinilai tidak mempunyai kontribusi bagi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Generasi suatu bangsa akan kehilangan jati diri dan integritasnya ketika perjuangan pendahulunya ditiadakan dalam catatan sejarah. Seperti halnya para Orientalis Barat, yang mendistorsi sejarah Islam, yakni sirah Rasulullah dan para Sahabat dalam bingkai “Deislamisasi”. Hal ini pula yang terjadi pada Ulama dan Santri serta umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

a) Perang Batak

Selain itu, sebagai respon terhadap para Imperialis Barat yang ingin menjajah bangsa Indonesia, pada tahun 1289-1325 H, atau 1872-1907 M, terjadilah perang Batak yang berlangsung bersamaan dengan Perang Aceh, pada 1873-1914 M. Kedua perang tersebut tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan provokasi yang dilakukan oleh Kerajaan Protestan Belanda. Hal ini dipengaruhi oleh perolehan hasil keuntungan Tanam Paksa yang sangat besar. Karena faktor kedekatan kedua wilayah tersebut, sehingga tidak mungkin salah satu diantara keduanya tanpa diserang untuk pelumpuhan sumber kekuatan lawan.

Perang Batak yang dipimpin oleh Si Singamangradja XII pada, 1289-1325 H/1872-1907 M. Dalam Sejarah Indonesia ditulis Si Singamangradja XII sebagai penganut agama Perpegu. Padahal dalam realitas sejarahnya, Si Singamangradja XII adalah seorang Muslim yang sangat fanatik dengan agama Islam. Hal ini dapat dibaca pada stempel yang digunakan oleh Si Singamangradja XII. Tidak hanya menyebutkan dirinya sebagai Raja di Bakara. Namun juga, menuliskan tahun Hijriah pada 1304 H.

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa dampak dari upaya Deislamisasi dalam penulisan Sejarah Si Singamangradja XII, yaitu membuat masyarakat setelahnya menjadi ragu jika Si Singamangradja XII dulunya adalah memeluk agama Islam. dan dianggap sebagai penganut agama Perpegu (Non-Islam), yaitu merupakan agama atau kepercayaan nenek moyang orang Batak.¹⁰³

b) Wali Songo

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, salah satu bentuk Deislamisasi sejarah yang dilakukan oleh Sejarawan Barat, misalnya, sejarah Wali Songo sebagai tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa, didistorsikan atau diselewengkan sejarahnya dengan menggambarkan mereka seperti tokoh Islam yang tidak mengenal Syariat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Anthony Smith,

¹⁰³Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 242.

bahwa selain melakukan pendistorsian dalam penulisan sejarah, Imperialis Barat juga melancarkan penjajahan berita (*news imperialism*).¹⁰⁴

Adapun dampak dari pendistorsian sejarah Wali Songo di atas terhadap masyarakat pembaca melahirkan aliran Kedjawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat, aliran Kesunden, yang menolak ajaran Syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah (*Inkarussunah*), dan lebih mengutamakan ajaran leluhur atau nenek moyang. Kemudian tingkah laku berikutnya, meninggalkan ajaran Islam dan aktivitas pasarnya.

Dampak yang demikian, menurut Lucian W. Pye dalam buku *Southeast Asia's Political Systems*, memang menjadi target dan strategi pemerintah kolonial Belanda. Target lain yang diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, hilangnya kesadaran umat Islam dalam menguasai pasar. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda, melalui penulisan sejarah, dibantu oleh orang bayarannya, menuliskan Sejarah Indonesia yang telah didistorsikan. Banyak Ulama yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu

¹⁰⁴Anthony Smith, *The Geopolitics of Information*, (Oxford University Press: New York, 1980), h. 69.

perjuangan bangsa dan negaranya.¹⁰⁵

Hal ini seperti dikemukakan Moh. Ali, yang menyatakan bahwa sejarah identik dengan tutur cerita atau kisah, karena bentuk tersebut dinilai paling efektif untuk pengemasan dalam penulisan sejarah. Meski demikian, sejarah sebagai sebuah cerita berbeda dengan teks cerita pada umumnya, Penulisan sejarah harus tetap berdasarkan fakta yang telah terbukti kebenarannya dan harus logis. Oleh karena itu, menurut Moh. Ali, suatu cerita yang tidak masuk akal apalagi tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai sejarah.¹⁰⁶

c) Peta Bumi

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, akibat dari Deislamisasi dalam penulisan sejarah, posisi geografi Makkah dan Madinah yang semula terletak di sebelah Barat dari Indonesia. Kiblat shalat umat Islam adalah menghadap ke arah Barat. Namun, bangsa Indonesia sekarang ikut menyebut negara-negara Arab sebagai wilayah Timur Tengah. Artinya, wilayah tersebut berposisi dari Greenwich sebelah Timur dan di Tengah. Sehingga Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan negara-negara ASEAN lainnya. disebut sebagai kelompok negara-negara Asia Tenggara. Tentu saja, penyebutan mata angin Tenggara ini kata Ahmad Mansur Suryanegara, dilihat dari Greenwich London.

¹⁰⁵Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 6-7.

¹⁰⁶R. Moh. Ali, *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*, h. 33-34.

d) Keruntuhan Kerajaan Hindu-Buddha

Dalam penulisan sejarah Indonesia, pada umumnya menuturkan adanya kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Indonesia, terjadi sesudah Kerajaan Hindu Majapahit runtuh. Padahal, Kerajaan Hindu Majapahit sendiri dalam sejarahnya didirikan pada tahun 1294 M atau abad ke-13 M. Yakni, sembilan belas tahun sebelumnya di Sumatra telah berdiri Kesultanan Samudra Pasai pada 1275 M. Selain itu tidak pula disadari bahwa di Aceh telah berdiri kekuasaan politik Islam Aceh pada abad ke-9 M. Tidak dijelaskan pula bahwa di Leran Gresik, Jawa Timur sendiri telah terdapat nisan Sultanah Fatimah binti Maimun Hibatullah yang wafat pada abad ke-11 M.

Hal ini tentu membuktikan bahwa Islam lebih dulu hadir di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya kesultanan Samudra Pasai dan Aceh, sekaligus membantah anggapan bahwa politik Islam atau kesultanan di Indonesia terjadi sesudah Kerajaan Hindu Majapahit runtuh.

Selain itu, dalam penulisan sejarah yang didistorsikan oleh sejarawan Barat, dibuatkanlah tulisan dongeng tentang Keruntuhan Kerajaan Hindu Majapahit akibat serangan Kesultanan Demak dan dan Keruntuhan Kerajaan Hindu Pajajaran oleh Kesultanan Banten, Hal ini seperti yang dikutip oleh D.G.E Hall dalam buku *A History*

of South East Asia.¹⁰⁷

e) **Nativisme Hindu-Budha**

Bentuk Deislamisasi sejarah Islam di Indonesia lainnya menurut Ahmad Mansur adalah, sejarawan Barat menyanjung dengan istilah zaman keemasan dan kejayaan untuk kekuasaan politik Hindu dan Buddha. Digambarkan Islam bukan *rahmatan lil alamin*. Melainkan Islam mendatangkan perpecahan. Sebaliknya, sekeping prasasti dijadikan sumber pembahasan sejarah tentang kejayaan dari zaman keemasan kekuasaan politik Hindu atau Buddha di Indonesia. Hal ini seperti yang pernah disinggung oleh Mohammad Natsir, yang menyatakan bahwa tantangan dakwah yang dihadapi umat Islam di Indonesia, yaitu; gerakan pemurtadan (kristenisasi), gerakan sekularisasi, dan gerakan nativisasi.¹⁰⁸ Menurut Mohammad Natsir, kaum nativisme berusaha menghidup-hidupkan kembali kebudayaan lama Indonesia, yakni Hindu-Buddha. Dengan tujuan untuk menggantikan budaya Islam, yang telah dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia.

Mohammad Natsir membagi kaum nativisme ini menjadi dua kelompok; yaitu kelompok yang alamiah dan kelompok yang terorganisasi. Kaum nativisme yang terorganisasi ini menurut M. Natsir, mereka lebih serius karena kecenderungan kelompok ini

¹⁰⁷D.G.E Hall, *A History of South East Asia*, (The Macmilland Press Ltd: London, 1976), h. 215.

¹⁰⁸M. Natsir, *Percakapan Antar Generasi: Pesan Perjuangan Seorang Bapak*, (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan Laboratorium Dakwah: Jakarta-Yogya, 1989), h. 99.

melakukan nativisasi untuk tujuan agenda hukum dan politik. Inilah yang kemudian membuat kaum nativisme perlu untuk 'mempribumikan' segala unsur yang dianggap asing.¹⁰⁹

Adapun dalam upayanya menghidupkan kembali ajaran Hindu-Buddha, sejarawan Barat melakukan berbagai cara, diantaranya seperti melakukan rekonstruksi sejarah, pemugaran candi dan patung, serta pembacaan ulang prasasti Hindu-Buddha, yang bertujuan untuk menggeser pengaruh ajaran Islam dan hukum Islam, serta melemahkan pengaruh Ulama. Dengan lemahnya pengaruh Ulama, keberadaan pemerintah kolonial Belanda akan dengan mudah dan leluasa serta tidak lagi mendapatkan perlawanan karena kalangan penganut Hindu-Buddha ditargetkan akan berpihak kepada pemerintah kolonial Belanda. Di sisi lain, pengaruh selanjutnya yang mereka targetkan adalah orientasi politik dan sejarah para pelajar dan sarjana hasil pendidikan Barat. Yakni, mereka menjadi cenderung lebih mengagumi nilai-nilai budaya Hindu dan Buddha serta ideologi politik Barat.

Pemerintah kolonial Belanda dan para sejarawannya, melakukan distorsi pemahaman dan interpretasi sejarah Indonesia. Orientasinya lebih Hindu-Buddha Sentrisme dan Neerlando Sentrisme. Artinya, dalam membaca gerak sejarah mayoritas bangsa Indonesia yang telah beragama Islam, mereka bertolak dari

¹⁰⁹*Ibid.*, h. 102-103.

tinjauan Hindu, Buddha, atau Belanda. Dampaknya, peran Ulama dan Santri dikecilkan dalam tulisan sejarah Indonesia. Selain itu, isi tulisan Nusantara A History of Indonesia hanya berupa sejarah Gubernur Jenderal Belanda dan Inggris penindas Islam.¹¹⁰

Akibat pandangan yang berdasarkan Hindu-Buddha Sentrisme, maka hasil analisisnya mengalahkan fakta sejarah berupa ribuan masjid, surau, langgar, dan kesultanan-kesultanan Islam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, akan tetapi sejarah Islam Indonesia tersebut dikecilkan. Sedangkan candi dan patung peninggalan Hindu dan Buddha yang sebenarnya hanya terdapat di sebagian kecil wilayah Indonesia. Penganutnya pun sebagai minoritas. Namun, penulisan sejarah Hindu-Buddha tersebut dibesar-besarkan, jauh lebih besar dari pada Islam.

Dapat dipahami mengapa sejarawan Belanda melakukan distorsi sejarah Islam. Hal ini dikarenakan Hindu-Buddha tidak pernah melancarkan perlawanan terhadap imperialis Barat yang menjajah bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah menganut agama Islam. Deislamisasi dalam penulisan sejarah Indonesia seperti ini merupakan salah satu strategi pemerintah kolonial Belanda dalam menghambat dakwah umat Islam, seperti dengan membesar-besarkan Hindu dan Buddha dan mendistorsikan tentang Islam. Padahal realitas sejarahnya, sekalipun Hindu-Buddha sangat

¹¹⁰Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid I, h. 295-296.

kecil pengaruhnya pada masyarakat Indonesia, tetapi dibesarkan dan dinilai positif. Ditafsirkanlah bahwa, Hindu-Buddha melahirkan “zaman keemasan” bagi Indonesia.

f) Kekuasaan Politik Islam

Pengaruh dari perkembangan kekuasaan politik Islam di Timur Tengah, India, dan Cina, lahirlah kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia dan sekitarnya, yaitu Leran, Samudra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Jayakarta, Sumedang, Pontianak, Sambas, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Ambon, Jailolo, Bacan, Malaka, dan Brunei. Kekuasaan politik Islam tersebut menggantikan kekuasaan politik atau Kerajaan Hindu dan Buddha (sebelumnya), yaitu Taroemanegara, Koetai, Padjadjaran, Talaga, Soemedang, Galoeh, Mataram I, Medang Kamolan, Toemapel - Singasari, Daha, Kediri, Blambangan, Madjapahit, Tandjoengpoera, Sriwidjaja.¹¹¹

Dalam penulisan sejarah Islam versi orientalis Barat, dikatakan bahwa kekuasaan politik Islam dikembangkan dengan pedang. Tuduhan ini diarahkan kepada para pemimpin Islam di setiap awal munculnya kekuasaan politik Islam. Yakni, dibuatkan suatu tulisan yang menuturkan bahwa antar pemuka Islam saling membunuh, yang diikuti pula dengan *story teller* (tukang dongeng) dengan penuturan yang provokatif. Apalagi saat itu, untuk

¹¹¹*Ibid.*, h. 89-91.

menerbitkan buku atau tulisan sangat sulit, kalau pun ada sangat sedikit. Sehingga untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang mendiskreditkan umat Islam tidak bisa dilakukan melalui buku ataupun tulisan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa gerakan Deislamisasi yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam salah satunya adalah dalam bentuk distorsi penulisan sejarah Khulafaur Rasyidin.¹¹²

Sistem penulisan yang demikian, yakni terjadi saling membunuh antar pemimpin Islam, juga dijadikan pola penulisan untuk sejarah Islam di Indonesia atau di wilayah lainnya. Misalnya, kisah sejarah Islam Kesultanan Demak yang dituliskan terjadi perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah antar keluarga Sultan.¹¹³ Akibat dari penulisan sejarah yang didistorsikan seperti demikian, menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, sehingga menimbulkan kesan negatif bahwa Islam memang benar menimbulkan perpecahan. Padahal realitas fakta yang terjadi belum tentu seperti yang mereka sangkakan tersebut. Namun, karena sudah terlanjur dibaca oleh masyarakat dan sudah diwariskan turun-temurun, akhirnya kisah seperti itu dianggap sebagai sebuah kebenaran sejarah.

¹¹²Yusuf Al-Qardhawi, *Meluruskan Sejarah Islam*, h. 26.

¹¹³Imron Abu Amar, *Sejarah Ringkas Islam Demak*, (Menara Kudus: Kudus, 1996), h.

4) Balatentara Jepang Masuk Ke Indonesia

Perjuangan Ulama dan Santri dalam menghapuskan penjajahan di bumi Nusantara ternyata masih panjang. Peristiwa penyerahan imperialis Protestan Belanda kepada Dai Nippon Jepang menjadikan Indonesia memasuki babak penjajahan baru. Ulama dan Santri dihadapkan dengan tantangan yang lebih berat, penjajah militer dan Kekaisaran Shinto Jepang yang berlangsung kurang lebih selama tiga tahun (1942-1945 M).

Dalam ajaran Islam, Ulama memang memiliki kedudukan yang tinggi dan peran penting dalam kehidupan umat. Hal ini dikarenakan para Ulama merupakan pewaris para nabi (*al-ulama'u waratsatu al-anbiya*). Peran Ulama dalam hal ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 2, adalah bertugas sebagai pencerahan bagi umat. Dengan kata lain, peran ini juga disebut sebagai amar ma'ruf nahy munkar, yang rinciannya meliputi tugas untuk: (1) menyebarkan dan memertahankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama, (2) melakukan kontrol dalam masyarakat (*social control*), (3) memecahkan problem terjadi dalam masyarakat, dan (4) menjadi agen perubahan sosial (*agenf of social change*).¹¹⁴

¹¹⁴Nanang Tahqiq (Ed.), *Politik Islam*, (Prenada Media: Jakarta, 2004), h. 189-190.

Peran Ulama tersebut teraktualisasi sepanjang sejarah Indonesia meskipun bentuk dan kapasitasnya tidak selalu sama antara satu waktu dengan lainnya dan antara satu tempat dengan lainnya. Hal ini tergantung pada struktur sosial dan politik serta problem dihadapi oleh masyarakat di mana ulama itu berada. Peran ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa, baik aspek sosial budaya, politik maupun ekonomi. Dalam konteks Indonesia peran ulama tersebut telah diwujudkan, baik pada masa sebelum datang penjajahan, pada masa penjajahan maupun pada masa kemerdekaan.¹¹⁵

a) Pembentukan Tentara PETA

Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA), merupakan unit militer yang beranggotakan masyarakat pribumi hasil bentukan Jepang di Indonesia. Tentara PETA didirikan pada tanggal 3 Oktober 1943, sebagai Tentara Sukarela. Hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Osamu Seirei No. 44, yang diumumkan langsung oleh Panglima Tentara Ke-16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada.

Tentara PETA memiliki peran yang sangat besar dalam Perang Kemerdekaan Indonesia melawan Imperialis Barat. Beberapa tokoh nasional yang pernah menjadi anggota PETA, antara lain: Presiden kedua RI Jenderal Besar TNI Soeharto dan

¹¹⁵*Ibid.*, h. 189-190.

Jenderal Besar TNI Soedirman.

Menurut Nugroho Notosusanto, sebelum pembentukan Tentara Pribumi, terlebih dahulu dilakukan penugasan kepada Kolonel Susumu Nishiura untuk mempelajari bagaimana Perancis menggunakan tentara Pribumi bangsa Maroko dalam mempertahankan jajahannya. Selanjutnya, Nugroho Notosusanto menjelaskan untuk merealisasikan upaya pembentukan tentara Pribumi ini diserahkan kepada Beppan, yaitu Seksi Khusus Dinas Intelijen Jepang.¹¹⁶

Pembentukan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dilakukan oleh Jepang saat itu merupakan realisasi dari perjuangan sepuluh Ulama yang mengajukan usulan kepada Saiko Shikikan Letnan Jenderal Kumashiki Harada, pada tanggal 12 September 1943 M, di Jakarta. Dalam penulisan sejarah Indonesia, akibat dari sistem penulisan yang bertolak dari Deislamisasi Sejarah Indonesia, maka nama-nama Ulama tersebut ditiadakan. Hanya ditulis bahwa Tentara Pembela Tanah Air (PETA) didirikan oleh pemerintah tentara Jepang sebagai perwujudan dari surat permohonan yang dituliskan dengan darah Gatot Mangkoepradja mantan pimpinan Partai Nasional Indonesia (PNI). Menurut Nugroho Netosusanto dalam penelitian Pusat Sejarah Militer Angkatan Darat, tidak pernah menemukan adanya surat

¹¹⁶Nugroho Notosusanto, *The Peta Army in Indonesia 1943-1945*, (Departement of Defence and Security Centre for Armed Forces History: Jakarta, 1971), h. 6.

permohonan yang dituliskan dengan darah Gatot Mangkoepradja tersebut.¹¹⁷

b) Gerakan Protes Sosial

Pemerintahan Jepang dikejutkan oleh pelaksanaan *Nippon's Islamic Grass Root Policy* yang berdampak terjadinya Gerakan Pesantren Sukamanah Tasikmalaya yang dipimpin oleh K.H Zainal Moestofa, Kiai Emas, Kiai Damon, Kiai Aip Abdoel Hakim, Kiai Nadjamoedin, Kiai Achmad Hidajat, Hadji Hafid pada tanggal 18 Februari 1944 M. Kemudian diikuti oleh Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Indramayu Cirebon, yang dipimpin oleh Hadji Madrijas, Hadji Kartiwa, Kiai Srengseng, Kiai Kusen, pada tanggal 30 Juli 1944 M. Kedua Gerakan Protes Pesantren ini bertujuan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia di dalam negeri Islam dan terbebas dari kekuasaan asing (Jepang).

Dalam penulisan sejarah Indonesia, Menurut Ahmad Mansu Suryanegara, umumnya, akibat adanya deislamisasi dalam penulisannya, hanya dituliskan bahwa K.H. Zainal Moestofa dan Kiai Emas memberontak melawan tentara Jepang yang manindas para petani Sukamanah Tasikmalaya. didasari kepentingan pragmatis semata. Namun, tidak dituliskan gerakan protes sosialnya tersebut menuntut Indonesia Merdeka berdasarkan Islam. Hal ini merupakan salah bentuk pendistorsian dan peniadaan peran

¹¹⁷Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 80-81.

agama dalam semangat juang para Ulama dan Santri dalam membela bangsa dan tanah air dari penindasan bangsa penjajah. Karena dalam pandangan mereka, mati ketika berjihad dalam melawan kebatilan adalah mati syahid, yaitu merupakan kematian yang dirindukan oleh setiap muslim, dalam hal ini adalah Ulama dan Santri.

c) **Proklamasi Kemerdekaan**

Berdasarkan pembahasa sebelumnya, menjelang pembacaan Teks Proklamasi, sekitar jam 7 pagi rakyat yang bersenjata bambu runcing dan senjata tajam lainnya sudah berkumpul menunggu dibacakannya teks Proklamasi. Sementara itu, sekitar tujuh puluh prajurit, dan lima orang perwira, Tentara Pembela Tanah Air (PETA) sudah berjaga-jaga mengamankan lokasi, mereka siap menghadapi segala kemungkinan, jika tentara Jepang mencoba menggagalkannya. Sehingga, jalan yang menuju Pegangsaan Timur 56 ditutup oleh Tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Dalam penulisan sejarah Indonesia, peran Tentara Pembela Tanah Air (PETA) dalam mengamankan proses pembacaan Proklamasi pada 17 Agustus 1945 M, dan Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia - PPKI, pada 18 Agustus 1945 sehari setelahnya, sering tidak dituliskan seperti yang dituturkan oleh Proklamator dalam buku *Bung Karno Penjambung Lidah*

Rakjat.¹¹⁸

Selain itu, peristiwa Proklamasi yang demikian akbar maknanya, sebagai puncak kemenangan perjuangan Ulama dan Santri, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, sikap umat Islam Indonesia pada setiap tanggal 9 Ramadhan, tidak menjadikannya sebagai tanggal dan bulan syukuran kemerdekaan, terbebasnya bangsa dan negara Indonesia dari penjajahan Barat dan Timur. Hal ini diakibatkan adanya kebijakan Deislamisasi Kalender dalam sejarah Indonesia, maka Proklamasi dianggap cukup hanya diperingati pada setiap tanggal 17 Agustus 1945 saja. Padahal, Proklamasi terjadi pada sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, yang diyakini oleh umat Islam sebagai hari Rahmat Allah SWT dan terjadi pada Hari Jumat, yang merupakan rajanya hari dalam ajaran agama Islam. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun dituliskan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Selain itu, Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ternyata diakui pertama kalinya oleh negara-negara Islam Timur Tengah. Sebaliknya, sampai 1947, tidak ada satu pun negara-negara penjajah Eropa Barat atau dari negara komunis Eropa Timur yang bersedia mengakuinya. Apalagi Kerajaan Protestan Belanda baru mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah HUT

¹¹⁸Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 148-154.

Ke-60 Republik Indonesia.¹¹⁹

d) Perang Sabil

Berdasarkan uraian sebelumnya tentang Perang Kemerdekaan membela Proklamasi 17 Agustus 1945, Yakti tidak dapat dipisahkan dari pengaruh semangat religius yang Islami karena perang dicengkram rasa takut yang kuat. Hanya didorong oleh keyakinan agama, maka akan bangkit keberanian menantang maut. Oleh karena itu, Bung Tomo dalam membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia dalam menghadapi pendaratan Tentara Sekutu Inggris dan tentara NICA yang akan menegakkan kembali penjajahan, melalui Radio Pemberontakan di Surabaya, dibangkitkan dengan Takbir *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar*, dalam penutup pidato radionya.

Dalam penulisan sejarah Indonesia hal seperti ini jarang sekali diungkap ke publik dan terkesan dipinggirkan dari penulisan sejarah. Padahal, Pidato Bung Tomo dalam membangkitkan semangat juang bangsa Indonesia dalam menghadapi tentara sekutu dengan meneriakkan Takbir *Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar*, dalam penutup pidato tersebut pengaruhnya membangkitkan semangat juang yang luar biasa dari Umat Islam.

Kemudian, Menurut Ahmad Mansu Suryanegara, istilah perang di kalangan masyarakat dan yang digunakan oleh media

¹¹⁹*Ibid.*, h.156.

cetak surat kabar pada saat itu adalah Perang Sabil. Dalam penulisan Sejarah Indonesia tentang Palagan Banyubiru, tidak ada lagi pengakuan terhadap keberhasilan penyerbuan yang dipimpin oleh Kiai Komar dalam Perang Kemerdekaan saat itu karena istilahnya pun tidak lagi menggunakan Perang Sabil, melainkan diganti dengan istilah Palagan Banyubiru. Alasannya, tentu jika masih menggunakan istilah Perang Sabil pasti pelakunya adalah umat Islam, Ulama, dan Santri. Namun, jika menggunakan istilah Palagan artinya tempat berlaga, tidak harus pelakunya umat Islam.¹²⁰

Selain itu, dalam penulisan Sejarah Indonesia tentang perang kemerdekaan ini, nama Kiai Soebhi juga ditiadakan kemudian disebutkan nama Tan Malaka sebagai pendiri Barisan Bambu Runcing. Padahal, realitas sejarahnya, Laskar Hizboellah yang banyak menggunakan akan Bambu Runcing khas Kiai Soebhi sebagai senjatanya.

Deislamisasi penulisan Sejarah Indonesia seperti ini, sebenarnya juga sudah ada sejak masa kolonial Belanda, yang menyatakan bahwa Islam tidak memberikan pengaruh terhadap kebudayaan Bangsa Indonesia. dan sebaliknya mereka menyanjung dan membesarkan-besarkan pengaruh Hindu-Bunda dengan maksud untuk menggantakan peran Umat Islam di benak para

¹²⁰*Ibid.*, h. 218.

pembaca sejarah. Hal ini pula yang terjadi pasca kemerdekaan, yang meniadakan peran Ulama dan Santri dalam Perang Sabil mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari Inggris dan tentara sekutu NICA.

b. Era Kemerdekaan

1) Gerakan Nasionalisme di Indonesia

Sejak masa penjajahan Kerajaan Portugis di Malaka, pada tahun 1511 M, hingga memasuki periode Kebangkitan Kesadaran Nasional Indonesia, di bawah penjajahan Kolonial Belanda, Ulama selalu tampil sebagai pelopor perlawanan bersenjata dan pembangkit gerakan kesadaran nasional. Dengan pengertian nasionalisme sebagai gerakan cinta agama, tanah air dan bangsa, serta anti imperialisme. Hal ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda memandang negatif setiap perjuangan nasionalisme dan patriotisme yang dilakukan oleh Ulama dan Santri di Indonesia.

Istilah nasionalisme dan patriotisme diartikan sebagai gerakan perlawanan terhadap imperialisme. Namun, istilah tersebut dianggap tidak relevan jika dilabelkan pada Ulama dan Santri dengan gerakan anti imperialistisnya. Ulama dan Santri dianggap sebagai tokoh pemutar tasbeih semata di masjid, dan dinilai tidak pernah melancarkan perlawanan terhadap imperialis Barat, Apalagi setelah adanya Perserikatan Nasional Indonesia (PNI), pada 1927

di Bandung, terjadi kecenderungan dalam penulisan sejarah Indonesia, bahwa gerakan nasionalis dipelopori oleh PNI.

Pengertian ini jelas sebagai bentuk pendistorsian atau penyelewengan dalam penulisan sejarah. Hal ini dikarenakan akibat dari kesalahan penulisan sejarah Indonesia, yang banyak dituliskan bukan oleh ulama atau sejarawan muslim yang berpihak kepada kebenaran sejarah. Dengan kata lain, hal ini terjadi akibat adanya upaya Deislamisasi dalam penulisan sejarah Indonesia. Pendistorsian dan penyelewengan penggunaan istilah nasionalisme dan patriotisme, di Indonesia menimbulkan pemahaman betapa sulitnya untuk mengartikan istilah tersebut jika dikaitkan dengan perjuangan Ulama dan Santri dalam membebaskan tanah air, bangsa dan agama dari penindasan imperialis Barat.

2) Sumpah Pemuda

Berdasarkan pembahasannya sebelumnya tentang sejarah Sumpah Pemuda, terbaca adanya upaya deislamisasi dalam penulisan sejarah. Yakni, dalam sejarah proses terjadinya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tidak disebutkan bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam dakwah agama Islam, serta bahasa Indonesia awalnya dituliskan dalam naskah lama dengan huruf Arab Malayu.

Selain itu, dalam sejarah Indonesia tidak dituliskan tentang peran Ulama dan wirausahawan yang menghadirkan bahasa Melayu sejak awal masuknya agama Islam ke Nusantara, Juga tidak dijelaskan bahwa bahasa Melayu digunakan oleh sekitar 40 kekuasaan politik Islam atau kesultanan sebagai bahasa politik dan diplomatiknya.

3) Piagam Jakarta, Pancasila dan UUD 1945

Menurut Anwar Harjono seperti yang dikutip oleh Ahmad Mansur Suryanegara, Piagam Jakarta kerap kali diindentikkan dengan ide Negara Islam. Padahal sepanjang sejarahnya, belum pernah ada satu partai Islam pun yang mencantumkan tujuannya untuk membentuk Negara Islam.¹²¹ Selanjutnya dijelaskan, apa yang disebut dengan Piagam Jakarta, sebenarnya tidak lain merupakan perumusan Pancasila yang pertama kali oleh pemimpin-pemimpin Indonesia dalam sejarah persiapan pembentukan Republik Indonesia.

Seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang Ideologi Pancasila serta konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yakni secara politis disetujui oleh para Ulama dan telah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dengan kata lain, perumusan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, tidak bisa dipisahkan dari peran para

¹²¹*Ibid.*, h. 169.

Ulama seperti Ki Bagoes Hadikoesoemo, dan Mr. Kasman Singodimedjo perwakilan dari Persyarikatan Muhammadiyah, Wachid Hasjim dari Nahdlatul Ulama (NU), bersama Mr. Teuku Mohammad Hasan dari perwakilan Ulama Aceh.

Namun, akibat deislamisasi dalam penulisan Sejarah Indonesia tentang lahirnya Ideologi Pancasila, menurut Ahmad Mansur Suryanegara, terbaca tidak seorang pun dari Ulama atau pimpinan organisasi Islam, yang berperan utama dalam perumusan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

c. Pasca Kemerdekaan

1) Hari Kebangkitan Nasional

Dalam upaya membangkitkan kesadaran nasional. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kabinet Hatta, menempuh berbagai cara untuk menyatukan berbagai konflik kepentingan dan ideologi antar partai politik serta militer pada waktu itu. Salah satu cara yang dipilih adalah dengan pendekatan kesadaran tentang sejarah, yakni dengan mengadakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Berdasarkan saran dari Ki Hadjar Dewantara dan Radjiman Wedjodiningrat, akhirnya dipililah tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanggal 20 Mei sendiri merupakan hari jadi organisasi Boedi Oetomo.

Meskipun secara resmi Hari Kebangkitan Nasional telah ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 melalui Keppres 316/1959 dan diperingati setiap tahunnya, penetapan Harkitnas 20 Mei menimbulkan polemik di masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan Ulama dan Umat Islam. Dasar pemilihan Boedi Oetomo sebagai pelopor kebangkitan nasional dipertanyakan lantaran keanggotaan Boedi Oetomo masih sebatas etnis dan teritorial Jawa.

Menurut Akira Nagazumi, yang mengutip pendapat BJO Schrieke, menyatakan bahwa Boedi Oetomo sebenarnya merupakan perhimpunan sarjana Jawa dan memiliki ikatan kuat dengan kebudayaan Jawa.¹²² Oleh karena itulah, lantaran karakternya yang Jawasentris tersebut, maka pemilihan hari jadi Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei, yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia (Hartiknas), menuai kontroversi dan polemik di masyarakat, karena Boedi Oetomo hanya mengangkat etnis Jawa dan tidak mewakili bangsa Indonesia yang mempunyai ragam suku dan budaya. Berdasarkan inilah, maka hari jadi Boedi Oetomo dinilai tidak layak untuk dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia (Hartiknas).

¹²²Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908-1918*, (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 1989), h. 230-231.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, Organisasi Boedi Oetomo ini sebenarnya telah dibubarkan oleh pendirinya sendiri, Soetomo. Dan para tokohnya, seperti Soewardi Soerjadiningsrat atau Ki Hadjar Dewantara, Dr. Tjipto Mangoenkosoemo, sebenarnya telah keluar dari Organisasi ini, karena dinilainya sebagai gerakan eksklusif dari Regent atau Boepati dan bangsawan Jawa atau Prijaji, yang menentang gerakan Kebangkitan Kesadaran Nasional.¹²³

2) Pendidikan Islam

Berdasarkan uraian sebelumnya, upaya Deislamisasi dalam penulisan sejarah Indonesia ternyata juga berdampak pada dunia pendidikan Islam. Misalnya, terjadi pergeseran makna dari istilah Madrasah yang semula dimaknai sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Islam (Universitas) pada masa kejayaan dunia Islam. Kemudian di Indonesia pengertian Madrasah mengalami perubahan, yang juga berpengaruh pada penggunaan istilah tersebut, yakni istilah Madrasah digunakan untuk Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas (MI/MTs/MA). Sementara, untuk perguruan tinggi, menggunakan istilah sekolah tinggi atau Universitas.

¹²³Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, Jilid II, h. 243.

Selain itu, dampak dari Deislamisasi dalam penulisan sejarah, yaitu istilah Pesantren yang dulunya merupakan lembaga pendidikan Islam yang mengadopsi dari sistem pendidikan Islam, seperti dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Fathimiyah, yakni sebagai tempat untuk mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu keislaman, oleh sejarawan Barat didistorsikan dan diselewengkan sejarahnya. Dimana, sejarawan Barat mengatakan bahwa Pesantren meniru dari sistem Pendidikan ajaran Hindu-Buddha. Akibatnya, Islam dianggap tidak mempunyai sistem Pendidikannya sendiri.

Kemudian, akibat dari Deislamisasi dalam penulisan sejarah Indonesia, pengaruhnya pun berlanjut hingga sekarang. Yakni, kita dapat melihat kebijakan pemerintah dalam pemberian nama-nama Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)), yang mengambil dari nama tokoh-tokoh Hindu-Buddha. Misalnya, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Airlangga (UNAIR), Universitas Mulawarman (UNMUL), dan lain-lain.

Selain menggunakan nama tokoh-tokoh Hindu-Buddha dalam penamaan Perguruan Tinggi Nasional, sebagian Universitas juga ada yang menggunakan nama-nama Kerajaan atau kekuasaan politik Hindu-Buddha, Misalnya, Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Sriwijaya (UNSRI), Universitas

Tandjungpura (UNTAN), Universitas Mataram (UNRAM), dan lain-lain.

Sementara itu, Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) hanya dibenarkan menggunakan nama-nama tokoh Islam saja. Namun, tidak dibenarkan menggunakan nama-nama kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang ada di Indonesia. Misalnya, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Djati, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim, Imam Bonjol, Alaudin, Raden Intan, Antasari, dan lain-lain.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terlihat bagaimana pengaruh Hindu-Budhha dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sehingga nama-nama tokoh dan nama-nama kerajaan Hindu-Buddha, menjadi inspirasi Pemerintah dalam pemberian nama kampus-kampus nasional. Hal ini tidak lepas dari peran sejarawan Barat, yang mendistorsikan sejarah Indonesia berdasarkan Hindu-Buddha Sentrisme.

2. Dampak Deislamisasi Sejarah Terhadap Pendidikan Islam

Sejak masa kolonial hingga tampilnya pemerintahan Orde Baru, pemerintah terkesan mengesampingkan dan bahkan ada wacana untuk menghapus sistem Pendidikan Islam di Indonesia. Namun, berkat semangat dan kegigihan para Ulama dan tokoh-tokoh nasional lainnya

dalam memperjuangkan Pendidikan Islam, sehingga membuahkan hasil kebijakan pemerintah Tentang Sistem Pendidikan Nasional. yang termaktub dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 tahun 2003.

Secara historis, pendidikan Islam di Indonesia sudah dikenal sejak awal kedatangan Islam di Nusantara. Pendidikan Islam pada masa itu menggunakan sistem individual (perorangan) dan berlangsung secara sederhana, serta tidak mengenal tingkatan seperti pendidikan pesantren. Kemudian seiring berjalannya waktu, Pendidikan Islam berkembang menjadi sistem kelas seperti dalam pendidikan modern pada saat ini.¹²⁴

Ada yang menarik di sini, meskipun Pendidikan Islam sudah terbilang lama di Indonesia, namun hingga sekarang lembaga Pendidikan Islam, mulai dari perguruan tinggi (Universitas), hingga sekolah-sekolah yang berada di bawahnya, kalah bersaing dengan lembaga atau sekolah-sekolah umun, dan kurang diminati masyarakat Indonesia.¹²⁵

Berdasarkan permasalahan tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai dampak yang ditimbulkan dari Deislamisasi dalam penulisan sejarah terhadap pendidikan Islam di Indonesia, yakni dengan memperhatikan beberapa Kebijakan pemerintah terkait pendidikan sejak kemerdekaan hingga masa sekarang, yakni sebagai berikut:

¹²⁴Rochidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet.I, (Alfabeta: Bandung, 2004), h.14.

¹²⁵Jalaluddin Rahmat, *Islam menyongsong peradaban dunia ketiga dalam Ulumul Qur'an*, (Vol 2, 1989), h. 112.

1) Pendidikan Islam Pada Masa Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya telah mendapatkan perhatian dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal tersebut bisa dilihat dari kebijakan pemerintah melalui Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BKNP) tanggal 27 Desember 1947, yang merekomendasikan bantuan terhadap Madrasah dan Pondok Pesantren.¹²⁶

Secara formal, Pendidikan Islam dipercayakan oleh pemerintah pembinaannya berada di bawah Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Maka pada saat itu pemerintah Indonesia mengeluarkan satu kebijakan terkait pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam, melalui Surat Keputusan Bersama dari dua kementerian, yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran, yang dikenal dengan istilah SKB 2 Menteri. Keputusan tersebut diantaranya adalah memutuskan bahwa mulai kelas empat SR (Sekolah Rakyat) diberikan Pendidikan agama. Selain itu pengelolaan pembinaan pendidikan Agama yang diajarkan di sekolah-sekolah Agama seperti Madrasah dan Pesantren akan dikelola oleh Departemen Agama (Depag), sedangkan pembinaan Pendidikan Agama untuk sekolah-sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah pusat.¹²⁷

¹²⁶H.A. Timur Jailani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (CV. Darmaga; Jakarta, 1990), h. 165.

¹²⁷Zuairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1992), h. 195.

Berdasarkan keputusan pemerintah tersebut, sekilas biasa-biasa saja. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, terdapat problem dalam kebijakannya, yakni dalam kebijakan tersebut adanya pemisahaan (dikotomi) antara Sekolah Agama dan Sekolah Umum. Sedangkan yang menaungi masing-masing lembaga pendidikan pun dari Kementerian yang berbeda pula. Hal ini oleh sebagian kalangan dianggap sebagai bentuk diskriminasi pemerintah terhadap pendidikan Islam. Apalagi istilah yang digunakan oleh pemerintah bukan menggunakan istilah pendidikan Islam melainkan pendidikan agama secara umum.

Sebenarnya, diskriminasi terhadap Pendidikan Islam ini muncul sejak zaman kolonial Belanda. Ketika lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah ada pada waktu itu, seperti Pesantren, oleh pemerintah Kolonial Belanda ditolak penggabungannya dengan pendidikan secara umum. Akibatnya, Pendidikan Islam pun tidak mendapatkan bantuan dan subsidi dari Pemerintah.¹²⁸

2) Pendidikan Islam Pada Masa Orde Lama

Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam mengembangkan pendidikan, khususnya Pendidikan Agama, yang secara formal Pembinaan pendidikan agama diserahkan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Zuhairini, Pemerintah Indonesia pada bulan

¹²⁸Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Modern*, (LP3ES: Jakarta, 1986), h. 6-7.

Desember 1946, secara resmi mengeluarkan aturan tentang Pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah umum sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak masa pendudukan Jepang.¹²⁹

Adapun landasan hukum penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum dan agama (Pesantren dan Madrasah), adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 pasal 20 jo No.12/1954. Namun, semenjak pembentukan Departemen Agama berdasarkan PP nomor I/ SD tanggal 3 Januari 1946 berdasarkan pada pertimbangan rekomendasi BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 22 Desember 1945, supaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengupayakan reformasi Pendidikan dan Pengajaran baru meliputi 10 poin termasuk di antaranya adalah permasalahan terkait pendidikan Agama, Madrasah dan Pondok Pesantren.

Selanjutnya, pada tahun 1950, ketika kondisi Indonesia mulai kondusif, rencana pendidikan agama secara nasional makin disempurnakan dengan pembentukan panitia bersama yang diketuai oleh Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hasil dari kepanitian itu adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada bulan Januari 1951 (Pendidikan), Nomor.K.1/652 dan pada tanggal 20 Januari 1951 (Agama).¹³⁰

¹²⁹Zuairini dkk, *Sejarah Pendidikan*, h. 153-154.

¹³⁰Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam, Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Gramedia Widiasarana: Jakarta, 2001), h. 25.

Memperhatikan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan, yakni sejak era kemerdekaan baik dalam hal pengelolaan maupun pelaksanaan, serta dalam hal pendanaan, memperlihatkan bagaimana sikap pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang besar terkait pengembangan pendidikan agama. Namun, masih terkesan adanya diskriminasi dalam pelaksanaannya, yang menempatkan pendidikan Islam berada di bawah pendidikan Umum secara nasional.

3) Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Memasuki era Orde Baru tahun 1966, Pemerintah Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), mengeluarkan satu kebijakan terkait pendidikan, yaitu peraturan pemerintah nomor XXVII/MPRS/1966 pada bagian Bab I pasal I, yang mengatur bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum, yakni mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah, hingga perguruan tinggi negeri.¹³¹

Demikian juga halnya dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor IV/MPR/1978, yang mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan lebih rinci lagi dijelaskan pada keputusan pemerintah nomor 08/c/u/1975, bahwa pendidikan agama di sekolah dasar sampai

¹³¹Karel A. Stenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah*, h. 93.

sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi pendidikan yang diajarkan dalam tiap minggu selama 2 jam untuk kelas 1, II, III SD, selama 3 jam untuk kelas IV,V,VI, selama serta 2 jam untuk SMP dan SMA, bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai studi pendidikan agama tidak mencapai sekurang-kurangnya mendapatkan nilai enam.¹³²

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Namun, pendidikan agama masih dianggap hanya sebagai pelengkap pendidikan saja selain pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Hal ini bisa dilihat sesudah dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia. Pada bagian bab IX Pasal 39 ayat I ditegaskan bahwa, isi kurikulum tiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat tentang pendidikan pancasila, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama.¹³³

¹³²*Ibid*, h. 94.

¹³³Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Perspektif Filsafat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2014), h. 89-90.

4) Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi

Sejak masa reformasi tahun 1998 hingga saat ini, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Pemerintah Otonomi Daerah, kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah, termasuk pengelolaan dan Pengembangan pendidikan, pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik.
- b) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang. Nomor 2 tahun 1989.
- c) Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari VIII Bab dan 84 pasal memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan, kualifikasi, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, penghargaan perlindungan sanksi, cuti dan lain-lain bagi guru dan dosen.
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat delapan macam standar yaitu, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian.

- e) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan di laksanakan.
- f) Keputusan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 2008 tentang kompetensi lulusan Pendidikan Agama dan Bahasa Arab.

Selain dari berbagai kebijakan tersebut, masih banyak lagi kebijakan pemerintah mengenai pembinaan pendidikan Islam yang tidak dapat diutarakan satu persatu. Hanya saja realitas yang ada sampai saat ini masih terkesan secara kelembagaan pendidikan Islam menempati posisi ke dua setelah pendidikan nasional. Sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan Islam kurang banyak diminati jika dibanding dengan lembaga lain yang dianggap lebih menjanjikan. Dan sampai saat ini pun posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekedar sebuah *sub system* dari Sistem Pendidikan Nasional.